

MOHAMMAD HATTA
AHMAD SUBÁRDJO DJOJADISURJO
A A MARAMIS
SUNARIO
A.G PRINGGODIGDO



URAIAN

PANCASILA

DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN
LAHIRNYA PANCASILA 1 JUNI 1945



penerbit

MUTIARA

jakarta



URAIAN PANCASILA

Oleh:

PANITIA LIMA

Mohammad Hatta
A. Subardjo Djojoadisurjo
A.A. Maramis
Sunario
A.G. Pringgodigdo

1642 Upr
Cetakan ke-II
1984.



penerbit

MUTIARA

jakarta

JALAN PULOKAMBING NO. 9 INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG
TLP. 483810 - 483335 - 481005 - JAKARTA TIMUR - INDONESIA

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISINYA

BAB	Hal.
Daftar Isi	3
Prakata	5
Pengantar Kata	7
I. Pendahuluan.....	13
II. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	21
III. Isi Pokok Pembukaan UUD 1945	22
1. Pernyataan I.....	22
2. Pernyataan II.....	22
3. Pernyataan III.....	24
4. Lahirnya Pancasila.....	24
5. Piagam Jakarta	26
6. Pancasila	27
IV. Perkembangan Paham Pancasila	29
1. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945	29
2. Pembukaan UUD RI yang pertama	33
3. Dalam Mukadimah UUD RIS dan Negara Kesatuan RI.....	35
4. Sejak kembali ke UUD 1945	36
V. Sila satu-satunya	39
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	39
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	41
3. Persatuan Indonesia	44
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	45
5. Keadilan Sosial	46
Terjemahan kalimat-kalimat asing.....	53
Daftar bacaan	55
Lampiran	
1. Notulen sidang Panitia Lima	57
2. Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945	97
-- Prakata	97
-- Wasiat Bung Hatta kepada Guntur	100
-- Lahirnya Pancasila	103



P R A K A T A

Untuk melayani khalayak ramai, khususnya para anggota MPR yang memerlukan datang dengar pendapat dengan Panitia Lima di kediaman Bung Hatta Jalan Diponegoro, Bung Hatta selaku Ketua Panitia Lima menyetujui agar Naskah Uraian Pancasila diterbitkan.

Buku ini adalah turunan dari Naskah Asli Uraian Pancasila yang ditanda tangani para anggota Panitia Lima di Jakarta tanggal 18 Pebruari 1975 dan di Lugano, Swiss pada tanggal 18 Maret 1975, yang turunannya oleh Panitia Lima disampaikan pula kepada Bapak Presiden Suharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Sdr. Jendral Soerono tanggal 23 Juni 1975.

Dalam penerbitan ini dimuat sebagai lampiran notulen sidang-sidang Panitia Lima dengan maksud agar para peminat dapat mendalami latar belakang pemikiran para anggota Panitia Lima, di waktu merancang dan merumuskan pengertian-pengertian Pancasila dalam Uraian Pancasila tersebut.

Oleh para anggota panitia sengaja Uraian Pancasila dibuat tidak terlalu panjang, sehingga tidak terlalu mahal bila diterbitkan dan terjangkau oleh rakyat umumnya, tetapi juga dengan tidak melupakan segi bobot ilmiahnya dalam kedudukannya sebagai ideologi Negara dan Bangsa Indonesia.

Tanpa dirancang sebelumnya, ternyata di waktu naskah ini naik cetak, kita semua menyongsong datangnya Hari Pahlawan 10 Nopember 1977. Karenanya penerbitan kali ini dimaksud pula untuk menghormati dan merayakan Hari Pahlawan itu, untuk mengenang jasa-jasa para Pahlawan Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pahlawan-pahlawan lainnya.

Setiap merayakan Hari Pahlawan kita akan menundukkan kepala; merenungkan dan renungan ulang dengan pertanyaan di relung hati masing-masing; "Apa yang masih dapat kita sumbangkan dari sisa-sisa hidup kita ini, untuk Perjuangan Bangsa, Negara Republik Proklamasi, serta apakah pengabdian kita ke-

pada Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya?"

Dan . . . kali ini dimohon tempat di lubuk hati anda . . . Pengamalan Pancasila.

Semoga hasil Karya Para Sesebuah, Pendiri Negara Republik Proklamasi yang berupa "URAIAN PANCASILA" ini mendapat tempat dan berkenan di hati Anda!

Kota Proklamasi 10 Nopember 1977.

Drs. Imam Pratignyo
Sekretaris I Panitia Lima

PENGANTAR KATA

Bersama ini disampaikan kepada khalayak ramai hasil karya "Panitia Pancasila" yang bertugas memberikan "Penafsiran Tunggal" mengenai Pancasila. Untuk menghindarkan segala rupa penafsiran, menurut pikiran-pandangan masing-masing orang akan makna Pancasila tatkala Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Tafsiran yang terdapat kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di kalangan masyarakat berbeda-beda sehingga menimbulkan "confusion of minds" mengenai makna Pancasila yang sebenarnya.

Maka oleh karena itu, atas anjuran Bapak Presiden Suharto terbentuklah Panitia Pancasila terdiri dari lima orang (Panitia Lima) yang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran, dan semangat lahir bathin para penyusun UUD '45 dengan Pancasilaannya.

Sebetulnya Panitia itu harus terdiri dari bekas Panitia Sembilan yang menanda tangani perumusan Pembukaan UUD '45 yang kemudian disebut "Piagam Jakarta"; yang dewasa ini masih hidup tiga orang, yaitu Dr. Mohammad Hatta, Professor Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Mr. Alex Andries Maramis.

Panitia Pembentuk Badan Penggerak Pengamal Pancasila berpendapat bahwa perumusan penafsiran tunggal mengenai Pancasila harus secepat mungkin selesai.

Oleh karena itu diminta kepada kami para "sesepuh" untuk merumuskan pengertian Pancasila yang terdiri dari lima orang :

1. Dr. H. Mohammad Hatta
2. Professor Mr. H. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo
3. Mr. Alex Andries Maramis
4. Professor Mr. Sunario
5. Professor Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo

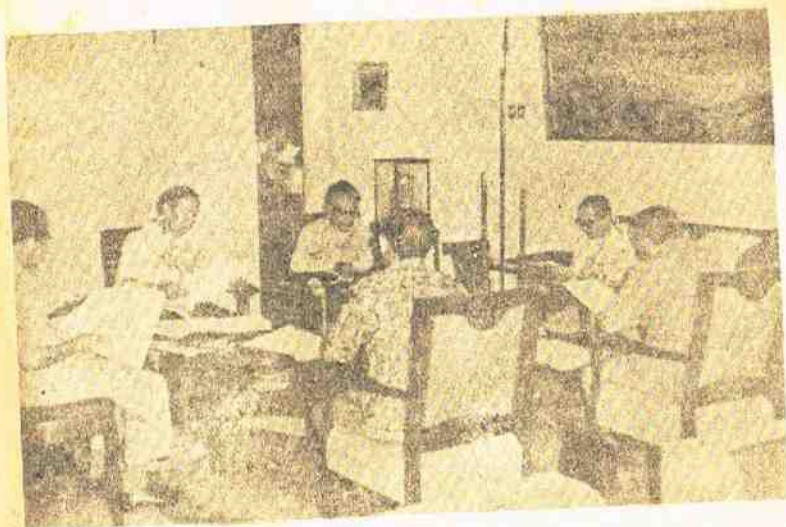
dibantu oleh dua orang Sekretaris yakni : Sdr. Drs. Imam Pratig-nyo dan Sdr. Drs. Surowo Abdulmanap.

Kelima anggauta-anggauta ini tidak dapat berkumpul selengkapnya berhubung Mr. A.A. Maramis masih berada di luar negeri.

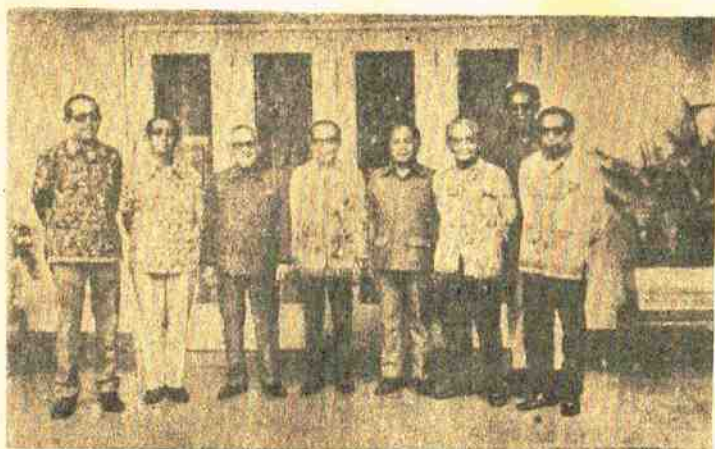
Setelah Panitia Lima bersidang beberapa kali mulai tanggal 10 Januari 1975, dicapai kata mufakat tentang bentuk dan isi penjelasan/penafsiran mengenai Pancasila ini. Hasil panitia ini dibawa ke Swiss untuk diperiksa dan ditanda tangani oleh Mr. A.A. Maramis.

Semoga penafsiran tunggal/asli ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia KINI dan ESOK.

PANITIA LIMA.



Sidang terakhir Panitia Lima di kediaman Bung Hatta Jl. Diponegoro. Dari kiri ke kanan tampak Drs. Soerowo Abdulmanap Sekretaris II, Prof. Mr Sunario anggota, Dr Moh Hatta Ketua, membelakangi lensa dari kiri ke kanan tampak Drs Imam Pratignyo Sekretaris I Prof Mr A.G. Pringgodigdo anggota, dan Prof Mr Ahmad Soebardjo hanya kelihatan bajunya. Dalam sidang akhir ini diundang pula Jendral Purnawirawan Djatikoesoemo (ujung kiri) untuk mendengarkan hasil-hasil Panitia Lima, tampak sedang mempelajari dengan penuh perhatian. (Photo Juffri).



Selesai Sidang Akhir bergambar bersama di depan rumah Bung Hatta. Dari kiri ke kanan Drs Imam Pratigny, Jendral Purnawirawan Djatikoesomo, Prof Mr Ahmad Soebardjo, Dr Moh Hatta, Prof Mr A.G. Pringgodigdo, Prof Mr Soenario, Drs Soerowo Abdoelmanap, dan di deretan belakang tampak Sdr Wangsawidjaja sekretaris pribadi Bung Hatta.



Delegasi Panitia Lima dipimpin Jendral Soerono diterima Presiden di Bina Graha 23 Juni 1977. Tampak Jendral Soerono sedang menyampaikan kata pengantar kepada Presiden. Dalam gambar tampak juga Sekretaris I Panitia Lima Drs. Imam Pratigny dan Sekretaris II Panitia Lima Drs. Soerowo Abdulmanap. (Photo Juffri)



Delegasi Panitia Lima diterima Presiden Soeharto. Tanggal 23 Juni 1975 Delegasi Panitia Lima diterima Presiden di Bina Graha dan dari kiri ke kanan tampak Bapak Presiden Soeharto, Dr. Mohammad Hatta, Prof Mr Ahmad Soebardjo, Prof Mr Sunario.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1975, Republik Indonesia akan mencapai usia 30 tahun. Sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia mengalami pasang surut nasibnya dalam menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Namun berkat bimbingan, Perlindungan dan Kurnia Tuhan Yang Maha Kuasa, Negara dan Rakyat Indonesia berhasil mempertahankan diri di tengah-tengah gejolak dunia yang penuh dengan problema-problema sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai bangsa yang hidup di ribuan pulau-pulau terdiri dari Tanah dan Air, ia mewarisi tradisi yang ditinggalkan oleh nenek-moyangnya berdasarkan peradaban yang mempunyai corak tersendiri. Peradaban itu ialah hasil daripada letaknya wilayah kepulauan Nusantara antara dua Samudera Besar, yakni Samudera Pasifik di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Masyarakat Indonesia, sejak zaman purbakala menerima berbagai aliran kebudayaan, yang berasal baik dari Timur atau Barat, dari Benua Asia, Timur Tengah dan Eropah dan dari Amerika.

Yang menjadi ciri khas daripada kepribadian bangsa Indonesia adalah kemampuannya untuk memilih apa yang baik untuk dimiliki dan membuang jauh apa yang buruk baginya.

Berkat kemampuan itu bangsa Indonesia memiliki sifat-sifat yang unik dalam pergaulan dunia, dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Sifat-sifat yang ditentukan oleh alam sekitarnya, filsafah hidup dan kebudayaan.

Yang nampak keluar dan mengesankan kepada bangsa lain ialah sifat-sifat toleransi, ramah-tamah dan suka menolong. Sehingga tidaklah mengherankan apabila sering dikatakan dalam bahasa asing: bangsa Indonesia, ialah "a smiling nation", suatu bangsa yang suka tersenyum.

Namun di samping sifat-sifat ketenteraman dan ketenang-

an jiwa, suka damai dan mendamaikan pertentangan kepentingan dan perbedaan (bentrokan) pendapat, rakyat Indonesia juga memiliki keberanian yang luar biasa, gigih mempertahankan diri terhadap serangan agresif dari luar yang membahayakan hidupnya dan kemerdekaannya sebagai bangsa.

Pada dewasa ini banyaklah unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar negeri dan banyak mempengaruhi cara hidup sebagian rakyat kita, terutama mereka yang berada di kota-kota besar, pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain pulau, sehingga mereka menyimpang dari dasar hidup yang telah menjadi adat kebiasaan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pancasila.

Hal demikian itu mudah terjadi karena kebanyakan warga negara Indonesia, apalagi generasi muda, tidak mengetahui apakah sebenarnya Pancasila itu, dan atas dasar dan tujuan apakah Negara Republik Indonesia didirikan?

Maka oleh karena itu perlu diketahui pertama-tama isi (teks) daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Namun membaca teks fasal demi fasal dari UUD 1945 itu tidaklah cukup. Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, kita harus juga mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Apakah keterangan-keterangannya yang sebagian telah masuk dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar dan dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi.

Semua itu perlu agar dapat dimengerti apa maksud Undang-Undang Dasar itu dan pikiran-pikiran apakah yang menjadi dasar Undang-Undang itu.

Oleh karenanya penting sekali mengetahui segala pembicaraan mengenai rancangan itu, yang menjadi matrial menjadi alat dan menjadi bahan yang historis untuk dimengerti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.

Pembicaraan itu dicatat selengkapnya oleh penulis notulen dengan steno, sehingga menjadi bahan yang historis dan bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud Undang-Undang Dasar itu.

Latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Adapun dalam dua sidang paripurna daripada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, telah diperbincangkan asas dan dasar Negara Indonesia, oleh 80 anggauta yang terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan dan cendekiawan-cendekiawan nasional.

Dalam pada itu yang menjadi pokok pembicaraan mengenai asas dan dasar Negara ialah bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Dasar dan bentuk susunan dari suatu negara berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial negara itu. Kita tidak bisa meniru belaka susunan negara lain, yang patut dipandang sebagai teladan. Apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Kalau kita hendak membangun negara Indonesia merdeka, adil dan makmur, haruslah dasar dan susunan negara sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.

Pada waktu kami merancang UUD 1945, kami telah dapat menyaksikan akibat-akibat dari susunan negara-negara Barat (Amerika Serikat, Eropah Barat). Dasar susunan negara-negara itu ialah *perseorangan* dan *liberalisme*. Segala sesuatu didasarkan atas hak dan kepentingan seseorang. Ia harus bebas dalam mengembangkan daya hidupnya di segala lapangan (ekonomi sosial, budaya, agama dan lain-lain) sehingga mengakibatkan persaingan maha hebat antara seseorang dengan orang lain, antara negara dan negara lain, berdasarkan egoisme yang hanya mengutamakan kepentingannya, baik perseorangan maupun negara.

Hal demikian itu menimbulkan sistim Kapitalisme di mana seseorang memeras orang lain (*exploitation de l'homme par l'homme*) dan imperialisme, di mana suatu negara menguasai dan menjajah negara yang lain.

Dalam pada itu tidaklah ada landasan moral yang dapat membatasi nafsu bertindak dan berbuat seseorang terhadap orang

lain atau suatu bangsa terhadap bangsa yang lain.

Perang Dunia ke-I (1914 – 1918) adalah akibat yang nyata dari pandangan hidup *liberalisme*, seperti yang diutarakan di atas tadi. Sistim tatanegara demikian itu yang mengutamakan kepentingan perseorangan dan kebebasan hidup tanpa landasan moral, menimbulkan keangkara-murkaan, membikin kacau-balau-nya dunia lahir dan bathin, sebagai semangat perseorangan tersebut.

Maka dari itu, tatanegara, tata hukum dan pandangan hidup demikian itu, tidaklah sesuai dengan lembaga sosial dari masyarakat Indonesia asli, sehingga jelaslah bahwa susunan hukum negara-negara Barat, yang berlandaskan teori-teori perseorangan dari para ahli pemikir seperti Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu dan lain-lain dari Perancis serta John Locke, Hobbes, Thomas Paine dan lain-lain dari Inggris dan Amerika, tidak dapat diambil sebagai contoh yang baik di Indonesia.

Demikian pula contoh yang diberikan oleh dasar susunan negara Sovyet-Rusia tidaklah cocok bahkan bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli.

Tatanegara Sovyet-Rusia berdasarkan pertentangan kelas, menurut teori yang diajarkan oleh Marx, Engles dan Lenin, yakni teori "golongan". Negara dianggap sebagai *alat* dari suatu golongan untuk menindas golongan lain, agar hanya suatu golongan saja yang memegang kekuasaan negara, yakni golongan kaum buruh (Dictatorship of the proletariat).

Teori ini timbul sebagai reaksi terhadap negara "kapitalis" yang dianggap dipakai sebagai perkakas oleh kaum "burjuis" untuk menindas kaum buruh. Kaum burjuis itu mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lemah. Maka perubahan negara Kapitalis menjadi negara Sosialis/Komunis menjadi dasar dan tujuan gerakan buruh internasional.

Dalam mencari dasar dan tujuan Negara Indonesia haruslah dilihat kenyataan struktur sosialnya, agar supaya negara dapat berdiri kokoh-kuat untuk bertumbuh sebagai ruang gerak bagi rakyat

dengan ciri kepribadiannya.

Adapun struktur masyarakat Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia oleh rakyatnya sejak purbakala sekarang.

Kebudayaan Indonesia itu ialah perkembangan aliran pikiran, yang bersifat dan bercita-cita *persatuan hidup*, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin. Manusia Indonesia dihindangi oleh *persatuan hidup*, dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana ia menjadi makhluk-Nya pula. Semangat kebathinan, struktur kerokhaniannya bersifat dan bercita-cita *persatuan hidup*, persatuan antara dunia luar dan bathin, segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan bathin.

Dengan mencapai keseimbangan lahir dan bathin itu, dia hidup dalam ketenangan dan ketentraman, hidup *harmonis* dengan sesama manusia dan dengan golongan-golongan lain dari masyarakat, karena sebagai seseorang ia tidak terpisah dari orang lain atau dari dunia luar, dari segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkutan paut, berpengaruh-mempengaruhi.

Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatupadu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupannya sehari-hari sebagai suatu kolektivita, dalam suasana persatuan. Sifat ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam *suasana* desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain. Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh *semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan*.

Kepala desa, atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat.

Oleh karena itu, kepala rakyat yang memegang adat, senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk itu senantiasa *bermusyawarah* dengan rakyatnya atau de-

ngan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Para pejabat negara, menurut pandangan tatanegara asli, ialah pemimpin yang bersatu-j jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara *berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat*.

Jadi menurut pandangan ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan; akan tetapi menjamin kepentingan *masyarakat seluruhnya sebagai persatuan*.

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggauta berhubungan erat satu sama lain dan merupakan masyarakat yang *organis*.

Yang terpenting dalam negara berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa *seluruhnya* sebagai *persatuan* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pandangan ini mengenai susunan masyarakat dan negara berdasarkan ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel dan lain-lain di dunia barat dalam abad 18 dan 19 yang dikenal sebagai *teori integralistik*.

Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggauta dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia maka tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera Lima Asas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan fasal-fasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 fasal saja ditambah dengan *Aturan Peralihan*, terdiri 4 (empat) fasal dan *Aturan Tambahan*, berhubungan dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya.

Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasar-

kan atas *Sistim kekeluargaan* maka segala pasal-pasal itu diselaras-kan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar, sehingga politik luar negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa.

Tugas Pemerintah ke dalam negeri, berdasarkan Pancasila, yang menjadi Ideologi Negara ialah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Kelima asas itu menjadi dasar tujuan pembangunan negara dan manusia Indonesia. Telah diutarakan di atas bahwa pada umumnya manusia Indonesia telah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan kebudayaan dan peradaban Indonesia dalam perkembangannya sejak dahulu kala sampai sekarang. Maka tugas Pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi Negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia.

Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi Negara, maka kelima sila itu merupakan *kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri.*

Setiap warganegara Indonesia yang sadar akan ideologi negara harus aktif mengambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan susunan negaranya dan janganlah pembangunan itu melulu menjadi urusan Pemerintah belaka, yang terjadi jauh dari minat para warganegara.

Kesimpulan

Dalam usaha menyusun UUD 1945 diingati pula dinamik masyarakat, dinamik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang hidup tumbuh dalam suasana Republik lahir-bathin; dalam

suasana itu tumbuhnya memang cepat dan gerak-geriknya juga besar.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 disusun hanya dalam garis-garis besar saja, agar mudah mengikuti dinamika masyarakat, jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai dibikin Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lainnya menjadi lekas usang.

Disadari bahwa rencana-rencana yang dibahas dalam kedua sidang paripurna tersebut di atas, jauh dari sempurna.

Meskipun rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat dalam waktu yang serba singkat, namun disadari sedalam-dalamnya janganlah merumuskan Undang-Undang Dasar itu dalam bentuk yang bersifat kristalisasi, karena aturan yang tertulis itu mengikat. Padahal dalam proses pertumbuhan masyarakat masih ada aliran-aliran yang bergerak-gerak dan tumbuh cepat.

Dalam pada itu yang terpenting dalam hidup bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, yang mematuhi Undang-Undang Dasar berdasarkan Pancasila.

Misalnya, meskipun Undang-Undang Dasar dibuat yang kata-katanya bersifat kekeluargaan, akan tetapi jika semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, semangat perseorangan tidak baik, Undang-Undang itu tidak ada harganya.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangatnya baik, betul-betul baik, berkobar, Undang-Undang Dasar itu tidak akan menghalang-halangi jalannya negara.

Dalam menyusun Undang-Undang Dasar dalam garis-garis besar saja itu, dapat diikuti perkembangan kehidupan masyarakat dengan lebih mudah, karena untuk menyelenggarakan pokok itu dapat diselenggarakan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

II. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

- I. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
- II. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, *maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

- III. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang *berkedaulatan rakyat* dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. ISI POKOK PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi atas tiga macam Pernyataan yang dalam teks di muka dibagi dengan angka Rumawi.

Pernyataan I mengenai dasar politik negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Pernyataan itu berdasar atas pengalaman bangsa Indonesia yang pahit kira-kira beratus tahun lamanya dijajah oleh bangsa asing. Banyak penderitaan yang dialami di masa itu.

Pengalaman itu memberi semangat kepada cita-cita pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi dasar pokok tuntutan-nya atas Indonesia Merdeka.

Cita-cita kemerdekaan itu membawa konsekwensi dalam politik luar negeri, apabila Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan direbut sebagai hak segala bangsa, sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Karena itu Indonesia *wajib* membela kemerdekaan segala bangsa yang masih terjajah dan menentang segala rupa penjajahan; politik, ekonomi dan ideologi.

Pernyataan ke II menyebutkan berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia, dengan kurnia Allah.

Pernyataan ini penting, karena atas rahmat Allah, bangsa Indonesia telah sampai kepada tujuannya, tetapi — belum masuk — baru berdiri di muka gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang *mestinya*: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melaksanakan kelima tujuan itu adalah tugas bangsa seterusnya dengan berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam suasana bersejarah di waktu itu untuk menentukan nasibnya sendiri — di mana bangsa Indonesia tidak berdaya menentang kekuasaan negara-negara besar yang begitu kuat — terasa benar bahwa Indonesia tidak akan merdeka jika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia, karena rakyat Indoensia memperjuangkan sungguh-sungguh dengan kurban yang tidak sedikit dan jiwa

serta cita-cita yang murni.

Pernyataan itu melarang orang bersifat takbur!

Bagian kalimat yang terakhir "*maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*", sebenarnya tidak tepat diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945, karena kemerdekaan sudah diproklamasikan lebih dahulu sebelum UUD yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan sesudah itu oleh Komite Nasional Pusat pada 29 Agustus 1945.

Adanya tercantum dalam "Pembukaan UUD" memperingatkan kita, bahwa *isi* pembukaan itu mula-mula diperbuat oleh Panitia Sembilan sebagai *teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, tanggal 22 Juni 1945.

Tetapi Proklamasi yang bertaku pada 17 Agustus 1945 menyimpang dari cara yang direncanakan bermula tidak memakai teks itu seluruhnya, hanya mempergunakan kalimat pokok saja, yaitu :

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan *Kemerdekaan Indonesia*.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

Waktu menempatkan dokumen itu sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 – karena segala-galanya dikerjakan tergesa-gesa – lupa mencoret bagian kalimat tersebut. Tetapi tetapnya tertulis dalam Pembukaan itu tidak membawa konsekwensi yang berat, malahan memperingatkan kita kepada sebagian sejarah.

Tetapi dalam Undang-Undang Dasar RIS dan perubahannya menjadi UUD negara kesatuan 1950 kealpaan itu diperbaiki dengan kalimat baru :

"Dengan berkat dan Rakhmat Tuhan tercapailah tingkat sejarah yang bahagia dan luhur".

Pernyataan ke III mengenai pembentukan negara dengan tugasnya, berdasarkan *Pancasila*.

Pernyataan ini penting sekali, meliputi tugas Pemerintah *ke dalam* dan *ke luar negeri*.

1. Tugas *ke dalam* ialah :
 - a. Melindungi bangsa dan Tanah Air Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tugas *ke luar* :

Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan :

 - a. Kemerdekaan segala bangsa;
 - b. Perdamaian abadi;
 - c. Keadilan sosial bagi segala bangsa.
3. Negara Indonesia ialah *Republik* dan negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam UUD pasal 1 ditegaskan, bahwa Republik Indonesia adalah *negara kesatuan*, sedangkan kedaulatan di tangan rakyat, dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Untuk melakukan tugas yang berat itu, negara RI berdasarkan kepada Pancasila :

Ketuhanan Yang Maha Esa;
Kemanusiaan yang adil dan beradab;
Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAHIRNYA PANCASILA

Sejak Perdana Menteri *Koyso* mengumumkan secara resmi pada bulan September 1944, bahwa Jepang berniat akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia "kelak kemudian hari", Pemerintah militer Jepang di Jawa mengadakan berturut-turut persiapan ke jurusan itu.

Sejak tanggal 9 September 1944, lagu Indonesia Raya boleh

dinyanyikan, bendera Sang Merah Putih boleh berkibar di sebelah bendera Jepang.

Propaganda Indonesia Merdeka boleh leluasa.

Pada tiap-tiap Departemen pusat diangkat seorang-orang Indonesia menjadi Sanyo (penasehat) untuk memperoleh pengalaman, yang dalam pikiran Jepang mungkin menjadi Menteri kemudian hari kalau Indonesia sudah merdeka. Sejak Desember 1944 diadakan Dewan Sanyo yang berapat sewaktu-waktu mempersoalkan berbagai masalah Indonesia Merdeka di kemudian hari.

Dalam bulan April 1945 dibentuklah *Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia* yang diketuai oleh dr Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya dr Radjiman antara lain memajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang: Apa *Dasar* Negara Indonesia yang akan kita bentuk?

Banyak yang berpendapat, bahwa pertanyaan itu yang membawa ke persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi pertanyaan dr Radjiman itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari pertama. Terutama Bung Karno memberikan jawabannya yang berisikan satu uraian tentang lima sila. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan nama "Lahirnya Pancasila". Uraian itu, yang bersifat kompromis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama.

Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk :

- a. Merumuskan kembali *Pancasila* sebagai *dasar negara*, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
- b. Menjadikan *dokumen itu* sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu di-

setujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberikan nama "Piagam Jakarta".

PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan-luhur, supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas, *maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.*

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah — darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada : Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;* menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".

Jakarta, 22 — 6 — 2605.

Ir. Sukarno.

Drs. Mohammad Hatta.

Mr. A.A. Maramis.

Abikusno Tjokrosujoso.
Abdulkahar Muzakir.
H.A. Salim.
Mr. Achmad Subardjo.
Wachid Hasjim.
Mr. Muhammad Jamin.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu Pendahuluan bagi UUD 1945, dengan mencoret bagian kalimat "*dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Alasannya, ada keberatan sangat oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.

Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja dari pada rakyat Indonesia, sekalipun bagian itu bagian terbesar. Penetapan tersebut selalu dapat dijadikan peraturan hukum dengan Undang-Undang yang melalui DPR.

Untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah bagian kalimat "*dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dari "*Pembukaan Undang-Undang Dasar*".

Pembukaan Undang-Undang Dasar, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negara seterusnya, dianggap sebagai *sendi* dari pada hukum tatanegara Indonesia. Undang-Undang Dasar ialah pelaksanaan dari pada pokok itu, dengan Pancasila sebagai penyuluhnya adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya tercapai Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

PANCASILA

Tidak saja pedoman bagi politik dalam negeri, tetapi juga

bagi politik luar negeri, karena di dalam Pembukaan disebutkan sebagai tugas Pemerintah Republik Indonesia, — di sebelah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa — juga *ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Sebab itu politik luar negeri Republik Indonesia ialah politik *bebas* dan *aktif*.

Bebas = sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara dan karena itu tidak memihak kepada blok-politik mana pun juga.

Aktif = membela perdamaian dan mencapai persaudaraan segala bangsa.

IV. PERKEMBANGAN PAHAM PANCASILA

I. Mula-mula dalam pidato Bung Karno tentang dasar-dasar negara dalam sidang *Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia* pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia itu dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Isi pertanyaan itu: Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk itu, apa dasarnya?

PANCASILA permulaan itu, rumusannya dan urutannya :

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme — atau perikemanusiaan;
3. Mufakat — atau demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

jadinya berlainan dari formula dan uraian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi *dasar ideologi* sama.

Pancasila terdiri atas dua lapisan fundamen, yaitu :

1. Fundamen *politik*;
2. Fundamen *moral* (etik agama).

Bagi Bung Karno sendi politik didahulukan, sendi moral jadi penutup. Bagi dia *dasar pertama* : *Kebangsaan* yang menghendaki SATU NATIONALE STAAT, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam terkumpul di sana, di khatulistiwa sebagai suatu kesatuan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi — satu-satunya *bukan* Nationale Staat. Untuk menegaskan pendapat ini dasar *Kebangsaan* disebut sebagai dasar pertama.

Bung Karno mempergunakan dalil-dalil teori Geo-politik — khususnya Blut-und-Boden Theorie, ciptaan *Karl Haushofer*. Teori ini sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa dan Tanah Air.

Jika teori persatuan darah-dan-tanah itu diterima sebagai satu kebenaran, maka batas Jerman lebih luas dari daerahnya di masa itu.

Bung Karno mengatakan antara lain : Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu bangsa dari satu keturunan. Jadinya geopolitik merupakan satu kesatuan darah-dan-tanah menjadi dasar bagi suatu nationale staat.

Demikian juga misalnya : Spanyol, Italia, keduanya menjadi batas yang "natuurlijk" — alamiah; dibulatkan oleh laut dan pegunungan.

Demikian juga India — India dahulu — merupakan suatu segitiga, ditentukan oleh pegunungan Himalaya dan Lautan Hindia.

Literatur antara lain :

1. *Karl Haushofer*, Geopolitik des pazifischen Ozeans, 1924.
2. *Karl Haushofer und Marz*, Zur Geopolitik der Selbstbestimmung, 1923.

Kritik atas teori geopolitik

Sangat menarik, tetapi kebenarannya sangat terbatas. Kalau dipakaikan kepada *Indonesia*, maka Filipina harus dimasukkan ke daerah Indonesia, dan Irian Barat (Irian Jaya) dilepaskan; demikian juga seluruh Kalimantan masuk Indonesia. Filipina tidak saja serangkai dengan kepulauan kita, tetapi juga satu asal dengan kita. Bangsa Filipina bangga mengatakan mereka bangsa Melayu.

Lihat misalnya *Georg A Malcom* dalam bukunya "First Malayan Republic, 1951".

Tetapi, toh, terhadap Indonesia dan Filipina yang kira-kira sama merdeka, ucapan teori geopolitik tidak berlaku. Faktor sejarah lebih besar pengaruhnya dalam menentukan nasib Indonesia dan Filipina. Sekalipun seasal dan serangkai kepulauan, sejarah memisah dalam dua hal :

1. Indonesia dan Filipina di bawah kekuasaan kolonial yang berlainan berabad-abad lamanya dengan segala konsekwensinya dalam perkembangan.
2. Penjajahan atas keduanya menanam pengaruh *kebudayaan* yang berlainan.

India dahulu, setelah merdeka, tidak tetap dalam kesatunya, melainkan pecah dua: India dan Pakistan. Dan Pakistan pecah dua pula, menjadi Pakistan dan Bangladesh.

Di sini faktor agama lebih berkuasa dari teori geopolitik: Blut und Boden.

SOAL BANGSA dan kebangsaan tidak begitu mudah memecahkannya secara ilmiah. *Sukar* memperoleh *kriterium yang tepat*; apa yang menentukan "bangsa?"

Tidak dapat diambil sebagai kriterium :

1. Persamaan asal,
2. Persamaan bahasa,
3. Persatuan agama.

Zwitserland (Swiss), suatu bangsa yang utuh, menunjukkan sebaliknya.

Soal "bangsa" dalam politik Eropah abad ke 10 dan permulaan abad ke 20:

- a. *Ke dalam*, menentukan nasib sendiri.
- b. *Antara negara*; dasar nasionalita, bahwa negara dan nasionalita harus sejalan.

Ini adalah pendapat politik hukum, istimewa berpengaruh dalam hukum negara dan hukum internasional, menjadi salah satu sendi kemudian bagi geopolitik.

Presiden *Wilson* mengambil pendapat itu sebagai dasar untuk mengatur sistim negara-negara di Eropah sesudah perang dunia I. Ingat program 14 pasal: Meleset dalam pelaksanaannya.

BEBERAPA MACAM KRITERIA

- a. *Ernest Renan*, *Qu'est ce qu'une nation?*
Jawabnya: *Le desir d'être ensemble.*
- b. *Otto Bauer*, *Was ist eine Nation?*
"Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft".
— Suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang *senasib*.
- c. *Lothrop Stoddard*, *New World of Islam*.
"Nationalism is a belief, held by a fairly large number of individuals that they constitute a 'Nationality'; it is a sense of belonging together as a 'Nation'."

KESIMPULAN dari berbagai kriteria itu dapat dikatakan :

"Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam di dalam hati dan otak."

Dengan kriterium ini dapat dipertahankan dan diuji cita-cita *persatuan Indonesia*.

Tidak perlu teori geopolitik, yang tidak punya dasar yang kokoh!

Dasar kedua :

Internasionalisme, untuk menegaskan — kata Bung Karno — bahwa kita tidak menganut paham nasionalisme yang picik, melainkan harus menuju *persaudaraan dunia*, kekeluargaan bangsa-bangsa.

Internasionalisme bagi Bung Karno sama dengan "humanity".

peri-kemanusiaan. Pendapat yang berasal dari gerakan sosialisme abad ke 19 dan permulaan abad ke 20.

PERINGATAN :

Di waktu sekarang, berhubung dengan Power Politics, kita harus berhati-hati mengartikan internasionalisme sama dengan "humanity".

Dasar *ketiga* : Permusyawaratan, oleh karena kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Maksudnya tak lain melainkan *demokrasi*, yang membawa sistim permusyawaratan dan *Dewan Perwakilan Rakyat*.

Dasar *keempat* : *Kesejahteraan Sosial* yang menciptakan prinsip : tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik — dan — ekonomi.

Dasar *kelima*: *Ketuhanan yang berkebudayaan*, yaitu luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, sehingga segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan yang dituju pula dengan Ketuhanan yang berkebudayaan itu ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Begitu pokok-pokok uraian Bung Karno tentang Pancasila.

II. *Dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia yang pertama, yang memuat antara lain kalimat yang berikut :*

.....
"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan so-

sial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia* dan *Kerakyatan* yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mengujudkan suatu *Keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di sini PANCASILA isinya, dengan meletakkan dasar *moral* sebelah atas :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan ber. Jab.
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan,
5. Keadilan Sosial.

Dengan meletakkan dasar *moral* di atas, negara dan pemerintahnya memperoleh dasar kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

KESIMPULAN :

Dasar Ketuhanan, Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam *perbuatan* dan *praktik* hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tak dapat terpisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan dalam praktik dari pada cita-cita dan

amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakekatnya, pemerintah negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

Akibat dari pada perubahan *urutan* yang lima pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah, dengan perubahan kata-kata, *politik negara* MENDAPAT DASAR MORAL YANG KUAT.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya sekedar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya.

Sila *ketiga* : *Persatuan Indonesia*, menggantikan sila kebangsaan bermula. Panitia sembilan orang, yang menyusun Piagam Jakarta — karena kuatir akan niat beberapa aliran pada fihak Jepang yang mau memecah Indonesia dalam tiga atau empat negara merdeka — mau menyatakan dengan itu, bahwa "*Indonesia satu, tidak terbagi-bagi*".

Sesungguhnya sila "Kebangsaan Indonesia" lebih dalam artinya — karena rasa kebangsaan dengan sendirinya meliputi rasa persatuan —, dipakai sila Persatuan Indonesia, yang di masa itu lebih tegas menyatakan tujuan Indonesia Merdeka.

III. DALAM MUKADDIMAH UUD RIS dan Negara Kesatuan RI tahun 1950, terdapat lagi pergeseran kata pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia berganti dengan sila *Kebangsaan*. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab disingkatkan jadi Peri-Kemanusiaan, seperti yang lazim disebut dalam peri-bahasa sehari-hari. Tetapi dasar moral tetap di atas. Ideologi negara tidak berubah. Jadinya :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Peri-kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Dalam susunannya itu fondamen negara menjadi lebih kokoh lagi, oleh karena dasar *kebangsaan*, yang meliputi persatuan bangsa dan negara kebangsaan — sebagai lawan dari negara "internasional" — lebih tepat dari pada persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia lebih menyatakan tujuan; Kebangsaan adalah dasar yang memeluk bangsa yang satu tidak terbagi-bagi.

Pancasila dalam Mukaddimah itu dinyatakan sebagai pegangan untuk mewujudkan *kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian* dan *kemerdekaan* dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Juga dengan itu tujuan Negara Republik Indonesia *tidak* berubah. Apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar pertama :

"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,"

di sini dinyatakan dengan 4 perkataan yang lebih konkrit isinya.

Tugas ini berat, sebab itu negara berpegang kepada dasar yang tinggi murni, seperti maunya Pancasila, yang mengandung di dalamnya *pengabdian* dan *ketaatan* bangsa. Dengan tiada pengabdian dan ketaatan, cita-cita akan menjadi satu bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka tidak akan tercapai dalam kesempurnaannya. Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.

IV. Sejak 5 Juli 1959 negara kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi. Tetapi — seperti dikatakan tadi — ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam Pembukaan hanya *memperkuat kedudukan Pancasila* sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara.

Soalnya sekarang; Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk

menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila?

Soal inilah yang sangat disangsikan. Dalam penghidupan sehari-hari Pancasila itu hanya diamalkan di bibir saja! Tidak banyak manusia Indonesia yang menanam Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu *berangkaian*, tidak berdiri sendiri-sendiri. Di bawah bimbingan sila pertama sila *Ketuhanaan Yang Maha Esa*, kelima sila itu ikat-mengikat. Yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama.

Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan.

Hubungan seorang juragan pengusaha dengan buruhnya harus dikuasai oleh rasa persaudaraan itu. Buruh bukanlah semata-mata alatnya, tetapi terutama pembantunya, membantu melaksanakan tercapainya cita-cita juragan pengusaha itu. Dengan tiada buruh pabriknya/perusahaannya tidak akan jalan.

Buruh ikut serta menggerakkan produksi, ikut serta mencapai rencana yang dirancangan oleh juragan pengusaha atau pemilik perusahaan itu.

Demikian juga hubungan kerja dalam *jentera kepegawaian negara*. Pemimpin-pemimpin tidak sanggup melaksanakan sendiri tujuan negara. Ada pemikir, ada pelaksana. Kerjasama yang rapi antara pemikir dan pelaksana *perlu*, kalau tidak tujuan negara tidak tercapai. Apabila dipikirkan sedalam-dalamnya, nyatalah bahwa semua perusahaan dalam masyarakat adalah *kerjasama*.

Makin baik hubungan manusia yang kerjasama itu, baik hubungan majikan dan buruh, maupun hubungan atasan dan bawahan dalam jentera pegawai negeri, makin baik hasil kerjasama itu. Pada tiap-tiap kerjasama dalam hubungan apapun, *yang satu bergantung kepada yang lain*.

Sebab itu kerjasama itu harus bersendi pada harga-menghargai. Ini adalah konsekwensi dari pelaksanaan Pancasila dalam praktek hidup, dalam perusahaan.

Apabila kita perhatikan kejadian-kejadian dalam masyarakat sejak beberapa tahun akhir ini, ternyata benar Pancasila itu *belum* meresap ke dalam jiwa rakyat. Lihatlah, mudah saja orang membunuh sesama manusia. Perselisihan sedikit kadang-kadang hanya perbedaan pikiran mengakibatkan tikam-tikaman.

Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak diamalkan. Beberapa tahun yang lalu terjadi di Jakarta suatu hal yang menyedihkan dan memalukan Pemerintah dan Negara. Seseorang yang dituduh mencoba mencuri becak ditahan dalam bui. Selama 15 hari ia ditahan, *tetapi tidak diberi makan*. Akibatnya jatuh meninggal di muka pengadilan, waktu perkaranya akan diadili.

Alasan polisi yang menahannya yang mengatakan, bahwa polisi tidak diberi uang untuk ongkos makannya adalah suatu alasan yang tidak berdasarkan tanggung jawab, bertentangan sama sekali dengan dasar negara, dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan . . . *dan terutama dasar Pancasila*. Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!

Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27, ayat 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.

V. SILA SATU-SATUNYA

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang *memimpin* cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan *perbuatan* dalam praktik hidup dari pada dasar yang memimpin tadi. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial, yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya.

Akibat dari pada perubahan urutan sila yang lima itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah karena itu, ialah bahwa *politik negara mendapat dasar moral yang kuat*.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing — seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula — melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, dengan itu memperoleh fondamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada *hakekatnya* tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Bukankah ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa Pancasila itu gunanya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?

Dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Mana kala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau

digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan benar.

Berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara direncanakan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi sendi politik negara dan politik pemerintahan, yang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih oleh rakyat menurut hak pilih yang bersifat umum dan kesamaan.

Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmoni antara kelima-lima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih dan sayang serta adil?

Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran, dengan kelanjutannya: menentang segala yang justa. Pengakuan itu mewajibkan manusia dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya: menentang atau mencegah kezaliman. Pengakuan itu mewajibkan manusia dalam hidupnya berbuat yang baik, dengan kelanjutannya: memperbaiki kesalahan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya; membasmi kecurangan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci, dengan kelanjutannya; menentang segala yang kotor, perbuatan maupun keadaan. Pengakuan ini mewajibkan manusia dalam hidupnya menikmati keindahan, dengan kelanjutannya: menyalakan segala yang buruk.

Semua sifat-sifat itu, yang wajib diamalkan karena mengakui akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa — menerima bimbingan dari Zad yang sesempurna-sempurnanya —

memperkuat pembentukan karakter, melahirkan manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Apabila sifat-sifat ini hidup dalam jiwa manusia, berkat didikan dan asuhan, maka dasar *kemanusiaan yang adil dan beradab* dengan sendirinya terlaksana dalam pergaulan hidup. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti disebut tadi, tak lain dari kelanjutan *perbuatan* dalam praktek hidup dari pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar yang memimpin tadi. Sebab itu pula letaknya dalam urutan Pancasila tidak dapat dipisah dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti juga dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar ini sifatnya universal, tidak terikat kepada batas negara atau corak bangsa.

Dalam rangka pemikiran tentang dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat universal itulah perlu diberi tempat yang layak dalam perundang-undangan *hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warga-negara*.

Terutama sekali penting benar *hak hidup* (keselamatan jiwa), *hak atas keselamatan badan* dan *hak atas kebebasan diri* seseorang, karena ketiga-tiganya nyata merupakan kurnia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga perlu mendapat perlindungan sejauh mungkin dari negara.

Oleh karena itu negara hanya berhak mencabut cq membatasinya dalam keadaan darurat, khususnya sebagai hukuman pidana berdasarkan aturan undang-undang, sesuai dengan asas-asas *negara hukum* yang menjadi sifat Republik Indonesia.

Tentang hak-hak lain yang juga dimiliki oleh semua warga-negara yang diakui sebagai subjek hukum, seperti *hak milik* dan *hak atas kehormatan* seseorang, ini lebih bersifat relatif, karena pengertiannya semata-mata bergantung pada ideologi bangsa/negara masing-masing, terutama mengenai hubungan dan perimbang-

an antara individu dan masyarakat. Khususnya tentang hak milik perlu sekali ditegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat mengakui hak milik seseorang yang diperolehnya dalam hidup bersama dalam masyarakat yang bersifat "kekeluargaan" atau "gotong-royong" ini, seolah-olah "tak dapat diganggu gugat dan keramat" (*inviolable et sacre*), jadi yang nyata bersifat individualistis, seperti tercantum dalam pasal 17 dari "Declaration des droits de l'homme et du citoyen" (1789). Tetapi, seperti juga halnya dengan hak-hak lain, hak milik itu mempunyai, bahkan bersifat "*fungsi sosial*" (lihat UUD Semi 1950), artinya mengandung pertanggungan jawab dan kewajiban-kewajiban besar terhadap Tuhan dan masyarakat, bangsa dan negara. Ini telah mulai diinsafi pula di negeri-negeri Barat. Misalnya dalam pasal 14 UUD Republik Federasi Jerman ditegaskan bahwa: "*Eigentum verpflichtet Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen*". Bahkan harus diingat, bahwa dalam sistim kekeluargaan, gotongroyong itu individu mempunyai lebih banyak kewajiban terhadap masyarakat daripada hak-hak, yang tidak boleh disalah gunakan

Bandingkan ini dengan bunyi pasal 29 Universal Declaration of Human Right (1948): "Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible". Berkata *Presiden Soeharto* dalam pidatonya di Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1974: "... segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dinikmati (manusia), pada dasarnya berkat bantuan dan kerja sama orang lain dalam masyarakat".

Dasar kemanusiaan ini berakar pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya tercermin dalam sila keempat (kerakyatan) dan ke-lima (keadilan sosial).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dicantumkan beberapa hak asasi warganegara, yakni dalam :

- Pasal 27* : persamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Pasal 28* : kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan;
- Pasal 29* : kemerdekaan (tiap-tiap penduduk) untuk memeluk agamanya masing-masing;
- Pasal 30* : hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
- Pasal 31* : hak mendapat pengajaran; dan
- Pasal 34* : hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara.

Lihat penjelasan selanjutnya di bawah "*kerakyatan*, dan sebagainya" dan "*keadilan sosial*."

Maka waktu disusun UUD kita, selain UUD sengaja dibuat ringkas, kurang waktunya untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang lain yang masih perlu diperhatikan (hak-hak asasi justisiil dan sebagainya). Oleh karena itu pengaturannya selanjutnya dapat dilaksanakan dengan undang-undang biasa.

Perhatikanlah bagian kalimat dalam pasal 28: "*dan sebagainya*" (Baca hubungannya dengan ini pidato-pidato *Mohammad Hatta* dan *Prof. Mr. Moh. Yamin*, Naskah persiapan UUD 1945 (1959) hal. 299 – 300 dan *Soepomo*, ibidem, hal. 357 – 358).

KESIMPULAN

Masih dapat beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warganegara diatur di dalam undang-undang biasa, bersama pembatasan-pembatasannya, menurut keperluan dewasa ini; jika perlu dengan diperkuat dengan Ketetapan MPR, berhubung dengan pentingnya materi.

Persatuan Indonesia

Dengan hidupnya sifat-sifat tersebut dalam jiwa manusia Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya, bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Persatuan Indonesia itu diperkuat pula oleh lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai ragam. Besarnya daerah kita menimbulkan dalam sejarah bahwa tiap-tiap daerah atau suku bangsa mempunyai corak masing-masing, tetapi keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yang dilingkungi sekeliling oleh dua segara, Segara Indonesia dan Segara Pasific dan diapit pula oleh dua benua Asia dan Australia. Dalam kedudukannya semacam itu hanya bersatu kepulauan Indonesia bisa teguh, terpecah jatuh. Sebab itu persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia.

Persatuan Indonesia itu lama sekali tidak diinsafi oleh bangsa kita. Sejak munculnya pergerakan rakyat pada permulaan abad ini, pada tahun 1908, tiap-tiap pergerakan membatasi diri pada pulau tempat lahir dan kediamannya masing-masing. Misalnya Budi Utomo bagi orang Jawa, Persatuan Pasundan bagi orang Jawa Barat, Serikat Sumatera bagi penduduk Sumatera, Sarikat Minahasa bagi orang Minahasa, Sarikat Ambon bagi orang Ambon. Kecuali Sarikat Islam, yang meliputi orang Islam seluruh Hindia Belanda dan Nationale Indische Partij yang meliputi penduduk seluruh Hindia Belanda yang menyebut dirinya Indiër. Baru pergerakan mahasiswa kita di Negeri Belanda, yang bernama *Indonesische Vereniging* (1922), yang menciptakan nama Tanah Air kita sebagai *Indonesia*, dan menganjurkan pula "*persatuan Indonesia*" dengan alasan yang kuat. Sebelum itu namanya Indische Vereniging, didirikan pada tahun 1908. Dalam tahun 1925 namanya diganti lagi menjadi *Perhimpunan Indonesia*.

Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya. Rasa persatuan Indonesia dipupuk pula kemudian oleh keinsafan yang terbit

karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafah itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar kemanusiaan yang adil beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamalkan seperti tersebut tadi akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, seperti ternyata dalam sejarah segala masa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan berhubungan erat pula dengan sila Keadilan sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan Sila-Sila Pancasila lainnya.

Hak-hak asasi manusia mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Sesuai dengan dasar dan tujuan negara maka demokrasi menurut UUD 1945, adalah kerakyatan dengan hikmat Permasyarakatan perwakilan, yang digali dari peradaban/kebudayaan Indonesia sendiri, gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat.

Azas Kerakyatan menjamin setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hal-

hal yang dapat melemahkan asas kerakyatan, masuknya kebudayaan asing yang merusak, soal-soal yang membangkit-bangkitkan feodalisme atau neo-feodalisme dalam segala bentuk harus dicegah dan diberantas.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial tidak saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia adil dan makmur.

Langkah pertama untuk menuju ke situ ialah melaksanakan penetapan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, yaitu "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Upah minimum hendaknya ditetapkan dengan undang-undang secepat-cepatnya. Keadaan di masa Hindia Belanda dahulu dapat diambil sebagai titik tolak. Di masa itu upah minimum sehari sama dengan harga 5 kilogram beras.

Keadaan di Indonesia Merdeka sekarang jauh lebih rendah dari pada itu. Ini hendaknya memalukan kita dan menanam tekad dalam jiwa kita untuk memperbaikinya. Undang-undang Perburuhan yang up-to-date hendaklah disiapkan secepat-cepatnya.

Dalam undang-undang hendaklah ditetapkan, bahwa upah dan gaji cukup untuk hidup. Tidak saja cukup untuk makan dan pakaian, tetapi juga untuk membayar sewa rumah, belanja anak-anak bersekolah dan membayar pajak segala rupa serta menyimpan serba sedikit sebagai celengan untuk kemudian hari.

Pengusaha-pengusaha paberi hendaklah menyediakan rumah tempat tinggal bagi buruhnya serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan dan menjamin kesehatannya sekeluarga. Tiap-tiap perusahaan yang cukup besar harus berlangganan dengan seorang dokter yang sewaktu-waktu datang memeriksa keadaan ke-

sehatan buruhnya.

Undang-undang negara hendaklah menetapkan kewajiban pengusaha memelihara kesehatan orang yang bekerja pada perusahaannya.

Tiap-tiap perusahaan lambat-laun harus diwajibkan mengadakan celengan terus-menerus bagi tiap-tiap orang buruhnya sebagai pembantu hidup buruhnya pada masa pengangguran. Apabila seorang buruh pindah bekerja ke tempat lain atau perusahaan lain, celengan itu yang tertulis atas namanya dapat pula dipindahkan ke tempat pekerjaan baru.

Sebagai anggauta Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) Pemerintah kita hendaklah berusaha secepat-cepatnya dengan berangsur-angsur melaksanakan pasal 55 dari pada Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, terutama yang tersebut pada huruf (a), menuju penghidupan yang lebih tinggi, bekerja penuh, dan syarat-syarat kemajuan ekonomi dan sosial dan perkembangan.

Dalam rangka keadilan sosial ada pula tujuan untuk menyamaratakan pendapatan masyarakat, supaya hilang perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan miskin, seperti yang berlaku pada negara-negara kemakmuran di dunia Barat.

Salah satu contoh, dapat dilihat pada sistim perpajakan di Inggris. Pendapatan yang melewati 4000,— poundsterling setahun pajaknya mulai meningkat dan terus-menerus berlipat ganda. Seorang yang memperoleh pendapatan 100.000,— poundsterling setahun, pajaknya tidak kurang 92.000,— poundsterling setahun. Tinggal bagi dia hanya paling banyak 8.000,— poundsterling setahun.

Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Dengan tujuan itu ditanamlah dalam UUD 1945 pasal 33 yang bunyinya seperti diketahui :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peraturan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ini sampai sekarang *belum* dijalankan oleh Pemerintah sebagaimana mestinya. Terlalu banyak aktivitas ekonomi diserahkan kepada swasta.

Pasal 33 itu adalah *sendi utama* bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Di situ terkumpul dasar ekonomi teratur. Karena kemiskinannya dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi paham Indonesia yang memberikan *segi ekonomi* kepada koperasi sosial lama: gotong-royong.

Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia mencipikan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.

Sebab itu pemimpin-pemimpin dan pencinta-pencinta koperasi harus dididik dan dilatih oleh Pemerintah, supaya jiwa dan keahliannya sesuai dengan keperluan dengan hidup koperasi pada tingkat yang lebih tinggi itu.

Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Persaingan hanya *boleh dan dianjurkan* dalam hal melatih diri untuk memperbesar kecakapan dan kemampuan. Pada koperasi, sebagai badan usaha berdasarkan azas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis ke-

pentingan orang seorang dengan kepentingan umum.

Koperasi semacam itu selanjutnya memupuk semangat toleransi — dan rasa tanggung jawab bersama —. Dengan itu koperasi mendidik dan memperkuat *demokrasi* sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang ke-empat seperti tertanam dalam Pancasila.

Koperasi selanjutnya mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar "self-help" dan oto-aktiva. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar.

Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat-laun disusun menjadi kuat. Tetapi untuk mencapai ini perlulah ada didikan, latihan dan pimpinan dari pemerintah, dengan menunjukkan bidang-bidang ekonomi mana yang harus digarap berangsur-angsur. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tapi teratur.

Sebab itu koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terkebelakang. Koperasi merasionilkan perekonomian, karena menyingkatkan jalan antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya koperasi produksi dan koperasi konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan perantara yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga, dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir karena itu, dapat dialirkan ke bidang produksi yang lebih produktif. Antara pabrik pupuk dan koperasi produksi (pertanian) tidak perlu ada organisasi lain. Koperasi pertanian dapat langsung memesan keperluannya akan pupuk ke pabrik pupuk. Sampainya pupuk pada koperasi tani dapat pula diatur pada waktunya. Karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah.

Dalam sistim pasal 33 UUD 1945 usaha-usaha ekonomi yang kecil dan sedang dikerjakan oleh koperasi. Koperasi diseleng-

garakan oleh orang-orang kecil dengan modal yang kecil pula, sebab itu perusahaan-perusahaan besar pada waktu permulaan dan beberapa waktu sesudah itu belum tergigit olehnya. Yang *besar-besar* itu diusahakan oleh negara.

Bukan saja perusahaan yang menghasilkan "public utilities", keperluan umum, harus menjadi perusahaan negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa Pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif. Di mana tenaga ahli sendiri kurang, Pemerintah menyewa pimpinan, management, dari luar negeri.

Selain dari memimpin perusahaan, management asing itu wajib pula mendidik orang-orang Indonesia sebagai gantinya kelak dalam waktu yang ditentukan. Suatu contoh yang diperlihatkan pada pembangunan pabrik semen Gresik dapat ditiru.

Setelah pabrik itu selesai dibangun, selama dua tahun konstruksi orang Amerika itu memimpin jalannya perusahaan. Setelah orang Amerika itu dengan stafnya kembali pulang, pabrik itu berjalan sebagai di bawah pimpinannya.

Pemimpin-pemimpin orang Indonesia meneruskan jalannya dengan efektif dan lancar seolah-olah pabrik itu masih di bawah pimpinan orang asing. Contoh yang seperti itu baik diteruskan pada perusahaan-perusahaan pemerintah yang akan dibangun.

Sebagian dari tugas membangun kemakmuran *rakyat* — kemakmuran *rakyat* bukan kemakmuran pribadi beberapa gelintir manusia Indonesia! — yang sebanyak itu dapat pula diserahkan mengerjakannya kepada organisasi swasta di bawah penilikan Pemerintah.

Di antara bidang koperasi dan perusahaan Pemerintah masih luas daerah perekonomian yang dapat diselenggarakan sendiri, firma atau Perseroan terbatas dan lainnya. Pada umumnya perusahaan kapitalis dasar kerjanya mencari keuntungan.

Dalam sistim UUD 1945 koperasi tidak termasuk usaha swasta, sekalipun ia bekerja dengan dasar oto-aktivita dan self-

help. Kooperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup. Dasarnya – seperti disebut dalam bahasa Jerman – "Bedarfsdeckungs prinzip". Keuntungan bukan tujuan bagi kooperasi.

Di mana Pemerintah dan kooperasi kekurangan dana, inisiatif, swasta dapat dimasukkan sebagai tambahan ke dalam program pembangunan menurut syarat-syarat yang ditentukan. Selama perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan fungsi produksi yang melengkapkan secara efektif, selama itu ia berjasa bagi masyarakat. Hanya tindakan swasta itu harus disesuaikan dengan rencana Pemerintah, dalam rangka ekonomi terpinpin, menurut UUD 1945. Tujuan ekonomi terpinpin ialah mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat. Kapital yang menganggur dan tenaga yang tidak bekerja berarti kerugian bagi tujuan kemakmuran. Sebab itu sumbangan yang positif dari pihak swasta untuk menyusun organisasi kerja dari pada tenaga dan kapital yang terlanter itu harus dimasukkan ke dalam rencana pemerintah.

Konsesi yang diberikan kepada perusahaan swasta dalam hal memotong kayu di hutan hendaklah diawasi betul, supaya hutan jangan dirambahnya semau-maunya. Tugas mengawasi pemotongan kayu di hutan itu tidak semata-mata dilakukan oleh Departemen Pertanian, tetapi Pemerintah Daerah tempat hutan itu terletak diberi pula tugas.

Pemerintah daerah yang ikut mengawasi diberi pula bagian tertentu dari pada hasil yang diperoleh Pemerintah pusat. Dasar pengawasan itu ialah supaya hutan itu jangan habis ditebang, jangan musnah, *tetapi ada untuk selama-lamanya.*

Hutan itu adalah harta nasional! Tiap-tiap pohon yang ditebang harus ditanam tiga buah gantinya. Jadinya prinsip yang dipakai ialah hutan harus diperbarui terus, terpelihara untuk angkatan rakyat Indonesia berturut-turut. Sesuai dengan prinsip itu, kekayaan laut kita dengan ikan terus terpelihara.

Penetapan UUD 1945, pasal 31, bahwa "tiap-tiap warga ne-

gara berhak mendapatkan pengajaran "hendaklah dilaksanakan dengan betul-betul. Demikian juga penetapan Undang-Undang Dasar, pasal 34, bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlan-
tar dipelihara oleh negara".

Keuangan Negara mungkin belum dapat melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan negara-negara demokrasi Barat, bahwa orang yang telah mencapai umur 65 tahun memperoleh pensiun dari negara, sekalipun ia belum pernah menjadi pegawai negeri. Itu sering disebut jaminan sosial. Jaminan sosial itu dipandang sebagai balas jasa kepada penduduk, yang berumur 65 tahun berjasa kepada negara. Dengan pekerjaan yang dikerjakannya ia memperoleh hasil. Sebagian dari hasilnya ia berikan kepada negara berupa pajak berbagai rupa. Sejak mulai dewasa menurut hukum sampai berumur 65 tahun, Pemerintah wajib membalas jasanya itu. Itulah dasar untuk memberi pensiun kepada penduduk yang sudah mencapai umur yang ditentukan.

JAKARTA, 18 - 2 - '75

Mohammad Hatta

Ahmad Subardjo Djojoadisurjo

Sunario

Abdul Gafar Pringgodigdo

LUGANO (SWISS), 18 - 3 - '75

A.A. Maramis

TERJEMAHAN KALIMAT-KALIMAT ASING

Hal. 29

"Geopolitik" dan seterusnya =
Geopolitik Segara Pasifik.

"Blut - Und - Boden Theorie" =
Teori darah dan bumi

"Zur Geopolitik der Selbstbestimmung" =
Tentang geopolitik mengenai penentuan nasib sendiri.

Hal. 32 :

"Ernest Renan"

Qu'est ce qu'une nation? =
Apakah bangsa itu?

Was ist eine Nation? =
Apakah bangsa itu?

I e desir d'entre ensemble =
Keinginan untuk hidup bersama

Hal. 32 :

"Lothrop Stoddard,"

New World of Islam =
Dunia Baru Islam

"Nationalism is a belief dan seterusnya" =

"Nasionalisme ialah kepercayaan yang dimiliki oleh suatu jumlah orang yang cukup banyak bahwa mereka merupakan suatu "bangsa"; yakni suatu perasaan untuk hidup bersama sebagai bangsa".

Hal. 42 :

"Declaration" dan seterusnya =

"Pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara".

Hal. 42 :

"Eigentum verpflichtet" dan seterusnya =

"Hak milik mengandung kewajiban, penggunaannya harus sekaligus mengabdikan kepada keselamatan masyarakat".

Hal. 42 :

"Everyone" dan seterusnya =

"Setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat karena di dalamnya sajalah mungkin (tercapai) perkembangan kepribadian yang bebas dan penuh.

Hal. 51 :

"Bedarfsdeckungsprinzip" =

"Asas penutupan kebutuhan".

DAFTAR BACAAN

1. *Presiden Suharto*, Pidato pada upacara Peringatan Lahirnya Pancasila, 1968.
2. *Presiden Suharto*, Pidato pada upacara Peringatan Ulang Tahun ke 25 Universitas Gajah Mada, Jogjakarta tanggal 19 Desember 1974.
3. *Presiden Suharto*, Sambutan pada peringatan Dies Natalis ke 25 Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 15 Februari 1975.
4. *Soekarno*, Lahirnya Pancasila, 1945.
5. *Soekarno*, To build the world anew, 1956.
6. *Mohammad Hatta*, Lampau dan Datang, 1956.
7. *Mohammad Hatta*, Pancasila Jalan Lurus, 1966.
8. *Mohammad Hatta*, Ideologi Negara, kuliah SSKAD, 1959.
9. *Mohammad Hatta*, Ekonomi Terpimpin, 1960.
10. *Prof. Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo*, UUD 1945 dilihat dari sejarah dan politik, 1966.
11. *Prof. Mr. Sunario*, Hak-hak asasi manusia, Ceramah di muka Panitia ad hoc MPRS, 1966.
12. *Prof. Mr. Sunario*, Individu dan Kolektivitet, dalam UUD Sementara RI, Pidato Dies Natalis pada perguruan tinggi Akademi Nasional, 1951.
13. *Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo*, Sejarah Pembuatan UUD RI tahun 1945 (dalam Majalah Hukum dan Masyarakat, Tahun ke III no. 2, Mei 1958).
14. *Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo*, Sekitar Pancasila, 1970.
15. *Prof. Dr. Soepomo*, Verhouding Van Individu en Gemeenschap in het Adatrecht, Pidato Inaugurasi RH, 3 Maret 1941.
16. *Ki Hadjar Dewantara*, Pancasila, 1950.
17. *R. Rosin*, Pancasila.
18. *Prof. Mr. Drs. Notonegoro*, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

19. *Ruslan Abdulgani*, Negara dan Dasar Negara, 1957.
 20. *Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto*, Dasar-dasar hubungan warganegara dengan Pemerintah, Pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum dan sebagainya di Universitas Airlangga di Malang, 12 Oktober 1960.
 21. *Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto*, Hak-hak dasar manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia, 1953.
 22. *Lembaga Pembina Hukum Nasional*, Hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke II, tahun 1968, mengenai di antaranya: Mekanisme Demokrasi Pancasila, dan Hukum acara Pidana dan Hak-hak asasi Pancasila.
 23. *Departemen Hankam*, Dharma Pusaka 45, 1972.
 24. *Lembaga Pembina Jiwa 45* (Angkatan 45), Membina Jiwa dan Nilai-nilai 45, 1972/74.
 25. *Laboratorium Pancasila IKIP Malang*, Pengertian Pancasila dan UUD 1945, 1971.
 26. *MPRS, Ketetapan-ketetapan MPRS*, Hasil-hasil sidang umum ke V, tahun 1968.
 27. *MPR, Ketetapan-ketetapan MPR 1973*.
 28. *Prof. Mr. H. Mohammad Yamin*, Naskah Persiapan UUD 1945, I, 1959.
 29. *Prof. Dr. N. Drijarkara S.J.*, Sosialitas sebagai eksistensial, 1962.
-

Lampiran.

1. NOTULEN SIDANG-SIDANG PANITIA LIMA

Tanggal 10 Januari 1975

Tanggal 28 Januari 1975

Tanggal 11 Februari 1975

NOTULEN SIDANG I PANITIA 5
TANGGAL 10 JANUARI 1975 PUKUL 09.15
DI KEDIAMAN BUNG HATTA JL. DIPONEGORO
J A K A R T A

— Hadir dalam Sidang :

1. Bung Hatta (Ketua).
2. Prof. Mr. Achmad Subardjo.
3. Prof. Mr. Sunario.
4. Drs. Imam Pratigny — Sekretaris I.
5. Drs. Soerowo Abdoelmanap — Sekretaris II.

— Belum hadir :

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo.
Mr. A.A. Maramis.

— Persoalan yang dibahas :

1. Lahirnya Pancasila.
2. Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia.
3. Masuknya Pancasila dalam Pembukaan UUD 45.
4. Hak-hak asasi manusia dalam hubungan dengan Pancasila.
5. Keadilan Sosial dalam hubungan dengan Pancasila.

I. Jalannya Sidang :

— Sidang dipimpin Bung Hatta dengan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan "naskah kerja" beliau yang berisikan 22 ha-

laman serta minta Drs. Pratigny untuk membacakan naskah tersebut.

- Selesai pembacaan naskah Bung Hatta menerangkan; bahwa materi dari naskah itu pernah beliau jadikan bahan kuliah di SSKAD pada tahun 1951 - 1959.
- Minta kepada Sekretaris menghubungi Jenderal Surono, meminta bantuan untuk mendapatkan bahan-bahan antara lain tape dan lain-lain yang mungkin masih tersimpan di SSKAD.

II. Tanya jawab dan pembahasan :

- Prof. Mr. Subardjo : Yang dibacakan tadi adalah baik sekali dan dapat dijadikan pedoman kerja.
- Prof. Mr. Sunario : Apa yang diutarakan dalam naskah kerja adalah penting sekali.
Ada beberapa kurang pengertian di dalam masyarakat tentang lahirnya Pancasila.
Ditanyakan tentang hari lahirnya Pancasila, apakah benar 1 Juni 1945.
Pertanyaan ini adalah dalam hubungan, karena dalam buku Prof. Yamin, Naskah Persiapan Penyusunan UUD tahun 1945, Yamin mengucapkan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain isinya mirip dengan Pancasila.
- Bung Hatta : Tidak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil. Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-

tegas mengusulkan filosofishe grondslag untuk negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah. Selanjutnya Bung Hatta menguraikan mengenai pasal 33 UUD, yang tadinya pasal 33 dan pasal 34 itu satu. Rumusan yang berupa tulisan tangan beliau dulu pernah dipinjam Pak Yamin tetapi tidak pernah dikembalikan lagi.

- Prof. Mr. Sunario : Pidato Bung Karno diterima dengan aklamasi dengan dibarengi oleh tepuk tangan yang riuh.
Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan tokoh-tokoh lainnya.
- Prof. Mr. Subardjo : Pernah menanyakan pada saya, tetapi hanya soal prinsip Internationalisme.
- Prof. Mr. Sunario : Bung Karno mengatakan bahwa beliau adalah merupakan salah satu penggali Pancasila; saya kira ini benar.
- Bung Hatta : Mungkin saja, tetapi yang jelas Bung Karno banyak mendapat ilham.
Ya, memang demikian halnya, misalnya saja asas Ketuhanan dari pihak PSII merupakan asas perjuangan partai.
Memang yang pelik pada waktu itu adalah antara golongan Islam dan golongan Nasionalis mengenai negara yang akan didirikan. Golongan Kristen banyak yang mengalah.

Pancasila yang diuraikan Bung Karno dapat mendedahkan pertentangan yang mulai tajam.

Sebelum sidang berakhir dibentuk Panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dari Panitia kecil itu dipilih lagi sembilan orang yang menjalankan tugas itu; yang menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Kemerdekaan Indonesia menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai pembukaan UUD 45 dengan mencoret bagian kalimat "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*".

Keberatan itu dinyatakan oleh golongan Kristen dari Indonesia Timur yang dibawa melalui Kaigun.

Prof. Mr. Sunario : Memang Pancasila tetap mempersatukan bangsa tetapi pada taraf moral yang luhur dianggap sebagai alat. Oleh Bung Hatta untuk Pancasila digunakan perkataan Ideologi?

Apakah dalam pengertian itu juga termaktub pengertian Pancasila adalah filsafat Sosial Politik?

Bung Hatta : Ya, demikian halnya.
Pancasila adalah filsafat Politik.

Prof. Mr. Sunario : Mengusulkan agar hak-hak asasi dimasukkan

kan dalam pembicaraan yang penting. Waktu beliau menjadi anggota MPRS pernah dibentuk panitia kecil untuk pembahasan tersebut agar menjadi TAP MPRS; tetapi hingga sekarang tidak ada follow upnya.

Agar diadakan undang-undang organik yang mengatur pelaksanaan hak asasi misalnya dalam bidang-bidang perburuahan, kesejahteraan sosial dan sebagainya.

- Bung Hatta : Baik, sekurang-kurangnya ada kekuatan Hukum. Kenyataannya bahwa banyak Hakim-hakim Muda, karena kekurangan literatur dan tidak mengetahui Bahasa Belanda, kurang dapat memahami hukum yang berlaku sekarang, yang sebenarnya masih bersumber pada hukum-hukum Belanda.
- Prof. Mr. Sunario : Justru itu Pancasila harus dihukumkan; untuk dijadikan hukum positif melalui DPR, dan kalau perlu MPR.
- Bung Hatta : Ya memang demikian, UUD 45 harus kita pelihara keasliannya.
- Prof. Mr. Sunario : Untuk membicarakan hak-hak asasi ini tepat waktunya, sesuai dengan pidato Presiden pada tanggal 19 Desember 1974 di UGM (dibacakan kalimat yang bersangkutan).
- Bung Hatta : Ya, memang benar perlu ada keseim-

banagan antara Individu dan Masyarakat, seperti misalnya Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Sosial.

Prof. Mr. Subardjo : Mengenai hak-hak asasi manusia tidak dimasukkan selengkapnya ke dalam UUD 45, karena sudah termasuk dalam pengertian systematika asas kekeluargaan.

Bung Hatta : Hal-hal tersebut di atas pernah saya berikan dalam kuliah-kuliah di SSKAD. Coba, dirumuskan dan disusun tentang hak-hak asasi manusia menurut Pancasila oleh Prof. Sunario dan keadilan sosial oleh Prof. Subardjo.

Prof. Mr. Sunario : Mengatakan bahwa akan kerja sama dengan Prof. Subardjo.

Bung Hatta : Kapan kita berkumpul lagi dan agar hasil-hasil Sidang I diumumkan.

Drs. Pratignyo : Mohon bertanya apakah benar hasil panitia sembilan itu namanya Piagam Jakarta.

Bung Hatta : Tidak benar; Yamin yang memberi nama Piagam Jakarta.

III. PENUTUP :

1. Sidang memutuskan Sidang ke II akan diadakan tanggal 28 Januari 1975 di kediaman Bung Hatta dan diharapkan anggauta lainnya telah dapat hadir.

2. Menugaskan :

- Prof. Mr. Achmad Subardjo, tentang segi-segi yang menyangkut pelaksanaan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
- Prof. Mr. Sunario merumuskan tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan Pancasila dan UUD 45.

3. Membuat press release hasil-hasil sidang pertama, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Sekretaris I.

Sidang ditutup pukul 11.00 oleh Ketua dengan mengucapkan terima kasih.

Disahkan :

tanggal 28 Januari 1975

Jakarta, 10 Januari 1975

Ketua

Sekretaris I

ttd.

ttd.

(Dr. Moh. Hatta)

(Drs. Imam Pratignyo)

Anggauta-anggauta :

Sekretaris II

ttd.

ttd.

(Prof. Mr. Subardjo)

(Drs. Soerowo Abdoelmanap)

ttd.

(Prof. Mr. Sunario)

ttd.

(Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo)

**NOTULEN SIDANG II PANITIA 5
TANGGAL 28 JANUARI 1975 PUKUL 09.15
DI KEDIAMAN BUNG HATTA JL. DIPONEGORO
J A K A R T A**

— Hadir dalam Sidang :

1. Bung Hatta (Ketua)
2. Prof. Mr. Achmad Subardjo
3. Prof. Mr. Sunario
4. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo
5. Drs. Imam Pratignyo — Sekretaris I
6. Drs. Soerowo Abdoelmanap — Sekretaris II.

— Belum hadir :

Mr. A.A. Maramis.

— Persoalan yang dibahas :

1. Pelaporan hasil karya Prof. Mr. Sunario tentang hak-hak azasi manusia dan warga negara.
2. Pelaporan hasil karya Prof. Mr. Subardjo tentang keadilan sosial.
3. Sistematika perumusan Pancasila.
4. Bahan-bahan dan data-data lainnya.

I. Jalannya Sidang :

- Sidang dipimpin Bung Hatta dan mempersilakan Prof. Mr. Sunario dan Prof. Mr. Subardjo untuk melaporkan hasil karyanya.
- Dari Sekretaris memajukan permintaan agar terlebih dahulu dapat disahkan notulen sidang yang lalu pada tanggal 10 Januari 1975.

- Melaporkan bahwa dari seorang darmawan yang tidak mau disebut namanya, mau membantu biaya perjalanan untuk menemui Mr. A.A. Maramis yang sekarang ada di Swiss.

II. Tanya jawab dan pembahasan :

Bung Hatta : Baiklah kita mulai dengan mendengarkan hasil karya Prof. Mr. Sunario dan Prof. Mr. Subardjo.

Drs. Soerowo : Perlu lebih dulu disahkan notulen sidang yang lalu (Notulen sidang tanggal 10 Januari 1975 dibacakan). Notulen sidang 10 Januari 1975 kemudian disahkan dan ditanda tangani oleh semua yang hadir.

Prof. Mr. Sunario : Ada press release yang telah dikeluarkan minta supaya dibacakan.
Drs. Pratigny sebagai Sekretaris membacakan dan menyatakan bahwa hampir seluruh surat kabar memuat.

Drs. Pragtityo : Kami ingin pula melaporkan bahwa ada seorang darmawan yang tidak mau disebut namanya ingin membantu suksesnya Panitia 5, dengan menawarkan biaya guna menghubungi Mr. A.A. Maramis yang sekarang berada di luar negeri.

Bung Hatta : Pada prinsipnya tawaran itu kita terima, hanya saya tidak mengetahui apakah Mr. Maramis bersedia pulang atau tidak. Saya dengar bahwa Mr. Maramis dewasa ini dalam keadaan sakit.

- Prof. Mr. Subardjo : Saya kira Maramis mau pulang hanya isterinya yang tidak menghendaki, ditambah lagi karena juga anaknya ada di sana.
- Prof. Mr. Sunario : Perlu kiranya sedikitnya kita mengirim utusan ke sana untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita perlukan.
- Drs. Soerowo : Meskipun mungkin Pak Maramis tidak dapat menghadiri rapat-rapat Pancasila; adalah penting sekali mengirimkan utusan, pertama untuk mendengarkan pendapatnya yang dapat dibawa ke sini melalui tape. Kedua kami dari angkatan 45 dan angkatan seterusnya seharusnya memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seorang yang telah berjasa besar untuk kemerdekaan Indonesia.
- Bung Hatta : Kalau memang ada yang sedia membiayai baik kita terima.
- Bung Hatta : Saya balik-balik di klat ada pula perumusan pendek tentang Sila-sila di Panitia 9 dan telah saya suruh tik; ini satu untuk Subardjo dan satu untuk Sunario. Jadi keadilan sosial Subardjo lebih panjang. Nanti rapat satu kali lagi kita bicarakan itu rumusan urutan dari Pancasila; sekarang umumnya lebih dahulu, dan sejarahnya.
- Akan kita tempatkan di mana hak-hak asasi manusia. Kalau tidak ada tempatnya di UUD lagi, apakah sebagai aman-

demen, soalnya telah pernah dimuat dalam UUD Sementara tahun 1950 secara komplit.

- Prof. Mr. Sunario : Ini ada usul dari Prof. Supomo yang diterima secara bulat (Naskah Persiapan UUD 45 karangan Yamin halaman 357) yang isinya antara lain sebagai berikut : "Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat dan sebagainya diatur dalam undang-undang." Jadi kita dapat memasukkan dalam Undang-Undang organik; cuma seboleh-bolehnya disetujui oleh MPR, tetapi kalau menurut ini DPR saja sudah bisa.
- Prof. Mr. Subardjo : Kita sebagai anggotanya PBB juga harus menyebar luaskan kepada rakyat deklarasi hak-hak manusia itu; hingga sekarang hari itu masih terus diperingati.
- Bung Hatta : Ada suatu soal lagi. Ini tentara telah mengeluarkan buku Dharma Pusaka, entah siapa filosofnya. Bagaimana Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 5? Kita serahkan kepada Presiden.
- Prof. Mr. Sunario : Ya betul, kita serahkan kepada Presiden.
- Prof. Mr. Pringgogidjo : Saya kira perumusan telah ada cuma yang sangat diperlukan pengertiannya. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu bagaimana. Agama Budha apa Tuhan-nya?

Ada mahasiswa yang menjawab Budha Gautama. Itu kan nabinya.

Hindu Bali mengenal Trimurti tetapi ada dewa yang lebih tinggi, ada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Sang Hyang Widi Wassa.

Juga misalnya mengenai persatuan Indonesia, dari mana asalnya nama Indonesia. Jadi hal-hal yang konkrit yang mudah dimengerti oleh rakyat yang diperlukan.

Bung Hatta

: Membacakan rumusan persatuan Indonesia sebagai berikut : Dengan hidupnya sifat-sifat tersebut dalam jiwa manusia Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya, bahwa Bangsa Indonesia adalah satu, tidak bisa dipecah-pecah.

Persatuan Indonesia itu diperkuat pula oleh lambang negara kita, Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai ragam. Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya. Rasa persatuan dipupuk pula kemudian oleh keinsafan karena percaya akan persamaan nasib dan tujuan.

Prof.Mr.Pringgodigdo : Sekarang pengertian mengenai nama Indonesia bagaimana?

Perlu dijelaskan juga secara populer. Juga pengertian sila-sila secara praktis.

Secara populer dijelaskan jangan hanya hapalan saja, tetapi supaya dapat dirasakan.

Prof. Mr. Sunario : Dalam hal ini, terlalu populer juga tidak bisa karena ini akan diserahkan kepada Presiden.

Pidato Presiden kepada UGM halaman 15 – 16 – 17, sangat penting dan merupakan pegangan bagi kita sekarang. Problem ini juga telah diucapkan Presiden kepada delegasi kita pada waktu diterima Presiden. Saya membuat perumusan ini pendek saja.

Hak-hak asasi manusia umumnya ialah leven, lijf, vrijheid, vermogen, eer dan antara lain yang penting adalah jiwa, badan, kemerdekaan, ini yang tidak diberikan oleh negara tetapi telah dimiliki dengan sendirinya (universil) dari Tuhan. Sedang mengenai vermogen tidak individualistis tapi kolektivistis. Saya ketbetulan membawa UUD Jerman Barat, yang menunjukkan bahwa Barat menuju ke arah kolektivisme atau yang disebut sosialisasi.

Dalam Grundgesetz tahun 1949, mengenai Eigentum, tersebut dalam art 14, fats 2 "Eigentum verpflichtet Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen". Ya, ini kan fungsi sosial, jadi sosialisme met of zonder Marxisme di Barat menuju ke arah sosialisasi. Koperasi kan juga menuju sosialisasi.

- Prof. Mr. Sunario : Jadi perumusan nanti terlebih dulu adalah Bung Hatta, Pak Subardjo mengenai keadilan sosial, dan hak-hak asasi terakhir.
- Drs. Pratignyo : Sistematika pembicaraan kita setelah sejarah selesai dibicarakan, kemudian perumusan pengertian dari sila-sila Pancasila.
- Bung Hatta : Ya, sila per sila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil Beradab; Persatuan Indonesia. Saya tambahkan dalam persatuan Indonesia, apa sebab nama negara kita Indonesia, yang singkat saja.
Dapat pula nanti dibuat brosure buat menerangkan lebih panjang, tetapi sekarang pendek saja.
Dulu nama Hindia Belanda (Nederlands Indie) dan perjuangan pemuda-pemuda kita mula-mula lokal, daerah-daerah. Kita perlu nama sendiri, bukan lagi Sumatera, bukan Jawa, bukan lagi Borneo, bukan lagi Sulawesi; Untuk persatuan selanjutnya kita pakai Indonesia.
- Bung Hatta : Jadi kapan kita rapat lagi. Tanggal 11 hari Selasa Pukul 09.15.
- Drs. Soerowo : Kalau kami dari angkatan 45 berusaha betul-betul mengerti artinya perjuangan angkatan 28 dan sekarang kami berusaha untuk meneruskan kepada Generasi Muda. Apakah sudah terima Keputusan-keputusan Musyawarah exponen angkatan

an 45 yang namanya Indonesia Kini dan Esok?

Prof. Mr. Sunario : Untuk menghubungkan 28 dan 45 agak berat, tetapi sekarang umum sudah mengerti.
Karenanya pengertian-pengertian sospel itu sangat penting.

Bung Hatta : Saya pernah diminta bantuan memberikan kuliah sospel.

Prof. Mr. Sunario : Itulah saya tahu banyak guru-guru besar; dosen yang hanya tahu secara teoritis Political science yang diambil dari buku Amerika (Barat).
Zonder pengalaman susah, justru mengenai Sumpah Pemuda; Proklamasi; Pancasila dan seterusnya.

Drs. Pratignyo : Kepincangan-kepincangan sosial sekarang antara lain juga karena kurang tepatnya politik ekonominya.
Teks book yang dipakai kebanyakan Keynes, Samuelson, Dilliard yang masuk ke Amerika dan sekarang masuk ke Indonesia sebagai Textbook pokok.

Bung Hatta : Yang saya ajarkan di Yogya adalah Politik Perekonomian, ya ini perbedaannya Politik dan Ilmu Ekonomi.

Drs. Soerowo : Saya sendiri dari Universitas Indonesia, tetapi tidak pernah mendapatkan pelajaran mengenai Pancasila.

- Drs. Pratignyo : Ya itulah persoalan sekarang. Bagaimana penetrapannya politik perekonomiannya kekeluargaan dan gotong-royong menurut Pancasila.
- Bung Hatta : Di UI memang tidak diberi pelajaran Pancasila, maka itu terlalu berat sebelah.
- Prof.Mr. Sunario : Kami dulu juga berpendidikan dari Belanda tetapi kami tidak terima begitu saja, tetapi kami kritis. Tetapi itu yang dari Berkeley umpamanya banyak ikut-ikutan sistem Politik di sana dan menetralkannya begitu saja di sini; kritis vermogen tidak dipakai sama sekali.
- Prof.Mr.Pringgodigdo : Kalau dulu kita memberontak kepada Belanda; tetapi sekarang banyak di-biayai Amerika, dan tidak ada kecurigaan, jadi enak saja dicekok ilmu Amerika.
- Prof.Mr.Subardjo : Ya tetapi di zaman Jepang dan Belanda dulu juga ada yang jadi Hollander.
- Drs. Pratignyo : Mengenai politik perekonomian kalau dapat juga dirumuskan pengertian-pengertiannya, sehingga dapat kita gerakkan secara nasional; yang harus pula mendapat perhatian dari semua Universitas. Ini penting karena apa yang berjalan di Amerika itu sebenarnya sistem Free Capitalistic Enterprise yang tidak begitu saja bisa ditrapkan di Indonesia. Sedangkan

kan di Eropa Barat sudah menuju ke arah Welfare state.

- Drs. Soerowo : Sekarang memang telah banyak perubahan-perubahan Sdr. Mashuri seorang dari ketua kita dalam pertemuan dengan Ex. Brig 17, TRIP dan TP antara lain menyatakan bahwa generasi muda kita sedang diserang oleh kebudayaan yang tidak positif, juga sekarang nyanyian-nyanyian perjuangan mulai didengungkan lagi di TV dan RRI.
- Prof. Mr. Sunario : Tetapi jangan juga feodalisme/neofeodalisme dimunculkan kembali, ini berbahaya sekali.
- Bung Hatta : Yang berbahaya bukan feodalisme opzich zelf tapi Neofeodalisme, kalau feodalisme tahu hak kewajiban, tetapi neofeodalisme tahunya hanya hak.
- Drs. Pratigny : Ya masalah sosbud itu juga antara lain karena struktur sosial ekonominya kurang benar, akibatnya juga mudah sekali diterobos kebudayaan-kebudayaan asing yang merusak.
- Bung Hatta : Koperasi sekarang juga rata-rata hancur, di Yogya juga tidak ada yang baik. Koperasi ditempatkan digabungkan menjadi Trust sendiri.
- Drs. Pratigny : Saya baca di Inggris misalnya pabrik baja itu semua sudah di tangan Pemerintah, tetapi di sini yang seharusnya

termasuk menguasai hidup orang banyak malah di PT kan, ini bagaimana?

- Bung Hatta : Ini bertentangan dengan pasal 33 UUD.
- Drs. Soerowo : Juga peraturan yang mengharuskan one share one vote untuk PT tidak sesuai dengan asas kekeluargaan.
- Bung Hatta : Pidato menteri Subroto yang menyatakan di Indonesia belum dapat diadakan minimum loon juga tidak tepat, kan di Jakarta bisa diadakan minimum loon, ini perlu untuk menjamin kehidupan.
- Prof.Mr.Sunario : Ada suatu hal yang saya inginajukan; jangan hak-hak asasi manusia saja, tapi hak-hak asasi manusia dan warga negara, kalau disebut supaya lengkap.
- Drs. Pratigny : Apa yang dikemukakan pak Nario dalam sistematika bahwa teori adalah derivatif dari filsafat, atau kalau istilah dari Bung Hatta Idiologi maka juga hak-hak asasi dan warga negara itu derivatif dari padanya.
- Prof.Mr. Sunario : Saya punya perumusan adalah filsafat negara yang diapplied, tapi saya tidak akan teruskan pemikiran tentang filsafat itu, karena bila kita lanjutkan, kan semua agama punya filsafat, Katholik dan sebagainya kan punya filsafat, tidak perlu lalu diteruskan kepada soal-soal causalitet, apa geest itu, apa materi itu, juga apa Tuhan dan apa manusia itu.

Yang penting Pancasila adalah sebagai sosial dan political phylosophy.

Bung Hatta : Baiklah kita akhiri sampai rapat tanggal 11 Pebruari 1975 yang akan datang.

III. Keputusan dan kesimpulan-kesimpulan :

1. Sidang memutuskan Sidang ke III akan diadakan pada tanggal 11 Pebruari 1975 di kediaman Bung Hatta pukul 09.15.
2. Memandang sangat perlu untuk menghubungi Mr. A.A. Maramis dan menerima baik tawaran seorang dermawan yang akan menanggung biaya-biayanya.
3. Pada sidang III akan dibicarakan perumusan sila-sila dari Pancasila.
4. Membuat press release, mengenai hasil-hasil sidang; yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Sekretaris I.

IV. Sidang ditutup oleh Ketua pukul 11.30 dengan mengucapkan terima kasih.

Disahkan :

Tanggal 11 Pebruari 1975

Jakarta, 28 Januari 1975

Ketua
ttd.

(Dr. Moh. Hatta)

Sekretaris I
ttd.

(Drs. Imam Pratignyo)

Anggauta-anggauta :
ttd.

(Prof. Mr. Subardjo)

Sekretaris II
ttd.

(Drs. Soerowo Abdoelmanap)

ttd.
(Prof. Mr. Sunario)

ttd.
(Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo)

NOTULEN SIDANG III PANITIA 5
TANGGAL 11 FEBRUARI 1975 PUKUL 10.00
DI KEDIAMAN BUNG HATTA JL. DIPONEGORO
J A K A R T A

— Hadir dalam Sidang :

1. Bung Hatta (Ketua)
2. Prof. Mr. Achmad Subardjo (Anggauta)
3. Prof. Mr. Sunario (Anggauta)
4. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo (Anggauta)
5. Drs. Imam Pratignyo (Sekretaris I)
6. Drs. Soerowo Abdoelmanap (Sekretaris II).

— Belum hadir :

Mr. A.A. Maramis.

— Persoalan yang dibahas :

1. Sekali lagi membahas Lahirnya Pancasila.
2. Sistematika kerangka uraian Pancasila.
3. Sila-sila Pancasila satu-satunya.

I. Jalannya sidang :

- Sidang dipimpin oleh Bung Hatta dengan mengajak membahas sekali lagi data-data tentang Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.
- Pembahasan kerangka Uraian Pancasila secara menyeluruh.
- Pembahasan sila-sila Pancasila satu-satunya.

II. Tanya jawab dan Pembahasan :

- Bung Hatta : O, ya saya ingin bertanya apa masih ingat di sini ditulis pidato Yamin 29 Mei apa benar itu, kapan pembukaan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan? Saya ingat Yamin bicara hari pertama, saya hari kedua dan Bung Karno hari keempat 1 Juni 1945.
- Prof. Mr. Sunario : Ya ini dalam bukunya.
- Prof. Mr. Subardjo : Kalau 29 Mei hingga 1 Juni, alleen vier dagen.
- Bung Hatta : Saya masih ingat waktu debat tegang antara golongan Islam dan lain-lain, lalu Bung Karno cari kompromis, diajak Maramis dan beberapa orang golongan Kristen dan beberapa orang golongan Islam. Orang Kristen banyak mengalah lalu datang pidatonya tentang Pancasila, hari itu saya tidak ada lagi, saya ada di Kalimantan.
Bung Gaffar yang tahu!
- Prof. Mr. Pringgodigdo : Tahu sih tahu pada waktu dulu, kalau sekarang susah untuk diingat-ingat kembali.
- Bung Hatta : Kan saya katakan tempo hari, Yamin licik kan!
- Prof. Mr. Subardjo : Itu duduknya persoalan bagaimana mengapa Yamin seolah-olah dianggap juga ilham Pancasila?

Bung Hatta : Oleh karena Panitia 9 merumuskan Pendahuluan; Bung Karno menanya panjang atau pendek, dan diminta Yamin mengarang agak panjang, karenanya mirip sekali dengan pidato Bung Karno.

Prof. Mr. Sunario : Ya mirip sekali.

Drs. Pratigny : Lalu itu dimasukkan dalam bukunya.

Bung Hatta : Ya dalam buku yang disebut Naskah Persiapan UUD 45, Pancasila itu dimasukkan di sana (Pidato 29 Mei '45), tahu saya pidato Pancasila yang pertama kali Bung Karno bukan Yamin. Kalau dia lebih dulu tentu saya ingat bahwa itu ulangan, Yamin bicara hari pertama saya hari kedua.
Itulah kelicikan Yamin dimasukkan di sini.

Drs. Pratigny : Dahulu waktu saya pegang Research Departu pernah mohon Pak Pringgo turunan notulen Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan, notulen itu kita perbanyak distensil, banyak sekali, pada waktu itu pak Yamin meminta; tetapi sebenarnya dalam notulen itu yang ada ucapan-ucapan yang pendek-pendek, kemudian Pak Yamin menyusun buku Naskah Persiapan UUD 45; barangkali yang di panitia 9 itu dipindahkan tanggal 29 Mei 1945. Mungkin begitu?

Bung Hatta : Ya itulah.

Prof.Mr.Pringgodigdo : Pak Yamin itu pinter nyulap kok!

Drs. Pratigny : Kejadian itu di sekitar tahun 1957 waktu saya datang ke UGM mohon notulen.

Prof.Mr.Pringgodigdo : La saya itu saya berikan seadanya saja!

Bung Hatta : Kemudian Supomo datang pada saya meminta untuk menerbitkan pidato-pidato pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia.

Saya punya semua sudah hilang dalam laci meja waktu Yogya diduduki Belanda. Supomo mengatakan bahwa bundel saya masih ada, jouw tulisan tangan mengenai perumusan bagian dari UUD; masih ada. Bagian kesejahteraan sosial. Itulah yang sekarang hasilnya menjadi fasal 33, 34, 27 aj 2. Pada waktu itu sidang dibagi 4, pertama Panitia UUD, kedua Panitia keuangan, ketiga Panitia ketentaraan dan satu lagi . . . ? Supomo ditunjuk ketua Panitia UUD, saya ketua Panitia keuangan dan Otto Iskandardinata atau Abikusno Panitia Ketentaraan.

Yamin dimasukkan dalam panitia saya, tetapi protes tidak mau. Ia ingin di Panitia Ketatanegaraan; tetapi di sana ia tidak diterima.

Diputuskan oleh Radjiman tetap panitia 2 saja.

Yamin bilang: "Saya tidak tahu keuangan dan ekonomi; lalu bilang, saya tidak datang sajalah".

Saya bilang, terserah. Jadi panitia lalu bekerja; yang dibuat garis besar saja. Karena dalam keadaan perang untuk membuat rencana begroting tidak mungkin; setelah perang bagaimana situasinya kan tidak tahu.

Karena Yamin tidak diterima dalam panitia UUD maka dia tidak bekerja. Sesudah Supomo menjadi menteri Kehakiman dia datang pada saya, yang menyatakan bahannya masih komplit ba; gaimana jika dikeluarkan sebagai buku? Baik sekali saya jawab, kerjakanlah! Dalam bundel saya masih ada tentang kesejahteraan sosial; jouw pidato dan rumusan handschrift.

Waktu Soepomo diangkat menjadi duta besar di Inggris ia menyatakan bahwa ia akan mengeluarkan itu dan masing-masing bekas anggota Badan Penyelidik mengirimkan bekas pidatonya, *tetapi tidak boleh dirobah kalimatnya, bahasanya boleh tetapi isinya tidak boleh.*

Waktu Soepomo sudah menjadi duta besar di London; ia tidak dapat mengerjakan karena besar ongkosnya.

Kemudian Yamin waktu menjadi Menteri PDK ketemu dengan Soepomo dan mengatakan kasihkan saja kepada saya akan saya terbitkan, tapi Yamin tidak keluarkan. Yamin berjanji katanya akan diberitahukan kepada saya, tetapi sama sekali tidak memberitahukan.

Kemudian setelah Supomo kembali dari London saya dengar itu; lalu saya tilpon Yamin, jawabnya nantilah saya carikan. Kemudian (setelah meninggal) isterinya saya kirim surat, Hutasoit juga, tapi isterinya mengatakan tidak ada lagi dan tidak tahu lagi bundel-bundel itu. Dalam buku ini pidato saya juga tidak dimuat bukan! Yang dimuat punya Yamin, Bung Karno, Supomo saja!

Prof.Mr. Subardjo : Pidatonya Yamin itu diucapkan tidak tanggal 29 Mei 1945?

Bung Hatta : Diucapkan tetapi bukan itu, ada pula pokok-pokoknya tetapi lain. Kalau ini kan mengikuti Pancasila saja!

Prof. Mr. Sunario : Sampai ini menjadi pegangan, sampai saya sendiri confused.

Bung Hatta : Waktu saya di Makasar ada mahasiswa yang menyatakan bahwa salah jika menyebutkan Pancasila UUD 45 dari Bung Karno, itu kan Yamin. Di mana kau tahu?
Bacalah bukunya katanya! Buku itu tak benar kata saya! Yamin memang ditugaskan Bung Karno membuat Pendahuluan, dibuatnya panjang tetapi ditolak!

Prof. Mr. Sunario : Apa yang diucapkan Bung Karno 1 Juni itu kan pikiran Bung Karno sendiri, apakah sebelumnya ada pembicaraan

dengan lain-lain. Ini secara logisnya saja; memang pidato dari Bung Karno hebat saya akui juga, tetapi kok semua lalu setuju saja, dengan tepuk tangan riuh!

Drs. Soerowo : Kalau melihat buku Bung Karno Men-capai Indonesia Merdeka dan Indonesia Menggugat dan sebagainya, memang materinya mirip.

Prof. Mr. Sunario : Itu benar, semua, bisa saja tapi Pancasila itu kan ernstig, kok lalu tentang dasar negara dikemukakan satu orang lantas semua intelektuil yang begitu tinggi pengetahuannya lantas tepuk tangan riuh rendah.

Bung Hatta : Pendek kata hanya dia yang menjawab pertanyaan Radjiman tentang dasar negara, yang lain tidak menjawab. Saya juga tidak menjawab tentang itu hanya mengenai hubungan negara dan agama. Itu pidato saya isinya, bahwa di Barat ada pemisahan agama dan negara. Di Barat Paus dianggap sebagai negara kerajaan Paus, sehingga timbul pertentangan terus, beratus tahun perang, kita kan tak ada, antara negara dan agama di sini isi mengisi. Pidato saya ini pernah disitir dalam tulisannya domine Verkuyl.

Prof.Mr.Sunario : Bung Karno mengatakan bahwa : saya bukan satu-satunya penggali, dan itu kan logisnya tidak mungkin muncul satu jam lantas semua setuju.

- Drs. Soerowo : Dalam pidato Prof. Mr. Notonagoro melantik Doktor H.C. di Gajah Mada Bung Karno dinyatakan sebagai pencipta Pancasila.
- Prof. Mr. Sunario : Ya itu ditolak Bung Karno dan ia menyatakan bahwa ia hanya sebagai Penggali Pancasila. Di lain tempat menyatakan; hanya salah satu penggali. Itu benar saya kira; sebelumnya sudah dibicarakan, sehingga semua bisa setuju, dalam satu jam.
- Bung Hatta : Itu tidak dibicarakan dalam Badan Penyelidik, orang tidak ada yang menjawab. Sebab itu dikemukakan politieke philosophy, sedangkan Radjiman titik berat pada arti phylosophy, dan akan habis waktu untuk itu saja, sedang kita memerlukan UUD yang cepat, hanya Bung Karno sajalah yang menjawab! Baiklah sekarang saya minta saudara pelajari apa yang telah saya kumpulkan, soalnya kupasan keadilan sosial Subardjo itu mirip dengan yang saya kerjakan, jadi bisa disatukan.
- Prof. Mr. Subardjo : Ya bisa.
- Bung Hatta : Uraian Bardjo seluruhnya dijadikan Pendahuluan, kira-kira sampai halaman 9, diambil sedikit satu halaman tentang sila-sila keadilan sosial dimasukkan dalam keadilan sosial yang saya bikin. Bagian kedua dibikin; Pembukaan UUD

(hal. 10), bikin satu paragraf.

Saya bagi dalam tiga pernyataan, yaitu tiga fasal isi pokok; Pembukaan UUD 45, sampai dengan Lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (hal. 8). Kemudian sejarah Perkembangan Pancasila (hal 9); mula-mula Pidato Bung Karno 1 Juni '45, untuk menjawab ketua Badan Penyelidik tentang dasar negara Bung Karno pakai Blut-und-Boden Theorie. Saya tambahkan kritik! Karena jika pakai itu Philipina masuk, tetapi Irian Jaya tidak. Kemudian sila satu-satunya; Sila pertama kita mulai dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tempo hari telah saya bagikan. Cuma sila kedua ini saya ringkas, dan nanti hak-hak asasi manusia dari saudara Sunario dapat ditambahkan di sini, kita bicarakan perumusannya.

- Prof. Mr. Sunario : Nanti saya susun konsepnya.
- Bung Hatta : Persatuan Indonesia saya tambahkan, saya rubah sedikit seperti yang dimajukan saudara Gaffar. Coba bacakan Persatuan Indonesia!
Coba baca!
- Drs. Soerowo : (membacakan selengkapnya perumusan Persatuan Indonesia).
- Bung Hatta : Cukup kiranya.
- Prof. Mr. Sunario : Saya minta perhatian meskipun menge-

nai lain halaman, halaman 8 tentang politik luar negeri.

Ini telah saya pikirkan 20 tahun, saya usulkan yang tepat; bebas ialah bebas yang sesuai dengan kemerdekaan dan kedaulatan. Politik non blok ialah konsekwensi dari politik bebas karena kalau tidak ada blok lagi, kita kan tetap bebas bukan?

Bung Hatta

: Coba rumuskan.

Prof.Mr. Sunario

: Bebas sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara dan karena itu tidak memihak kepada blok politik manapun juga.

Apakah aktif itu juga tidak untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan?

Bung Hatta

: Aktif mencari perdamaian, tetapi kalau kita dilanggarnya kita bertahan, jadi politik kita adalah diplomasi dulu, kedua tentara. Jadi pada lini kedua pertahanan, lini pertama mencari persahabatan.

Halaman 8 nanti ditik kembali!

Prof.Mr.Sunario

: Ini semua kan belum diterima, barangkali nanti ada perbaikan.

Bung Hatta

: Ya memang belum, nanti dibicarakan kembali. Coba bacakan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (halaman 25).

- Drs. Soerowo : (membacakan selengkapnya perumusan Keadilan Sosial).
- Prof.Mr.Sunario : Saya setuju sekali, nyata sekali ada hubungan antara keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia, karena di sana tiga kali disebut; bila tidak mengerti tentang hak, susah untuk mengerti tentang keadilan sosial. Jadi memang hak-hak asasi manusia masuk juga dalam Pancasila.
- Drs. Pratigny : Dalam kuliah-kuliah Bung Hatta sering menyebut demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi dan hal ini fasal 33 belum tercermin dalam rumusan keadilan sosial.
- Bung Hatta : Belum dibuat, apa dimasukkan di sini juga?
- Drs. Pratigny : Ini juga sangat pokok sekali.
- Wangsawijaya : Musyawarah eksponen 45 juga memuat persoalan itu!
- Drs. Pratigny : Ya ini appliednya dalam politik ekonomi dari fasal 33 UUD, karenanya maha penting sekali!
- Bung Hatta : Disebut saja, tidak perlu diuraikan?
- Drs. Pratigny : Kalau dapat diuraikan pengertian demokrasi itu bukan demokrasi liberal tapi demokrasi sosial-ekonomi, di mana ada unsur ekonomi!

- Bung Hatta : Cobalah dirumuskan, tambahan itu saya sesuaikan dengan uraian saya.
- Prof. Mr. Sunario : Jangan sampai kekeluargaan itu diartikan untuk beberapa keluarga saja dalam kehidupan ekonomi, unsur kolektifnya jangan dipakai pengertian untuk manusianya masing-masing karena ini akhirnya akan bisa mengarah ke arah machtsstaat dan sebagainya.
- Drs. Soerowo : Sekarang itu apa yang seharusnya menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, tidak dikuasai negara.
- Bung Hatta : Sekarang perusahaan-perusahaan itu diberikan kepada swasta.
- Drs. Soerowo : Karenanya pengertian-pengertian pasal 33 itu perlu ditegaskan, kalau musyawarah eksponen 45 sudah menegaskan bahwa sekarang itu sudah terlalu jauh, sudah liberalistis.
- Bung Hatta : Memang, itulah yang selalu saya katakan bahwa kebanyakan ekonoom kita itu didikan dari Amerika dan melihat Amerika sekarang, tetapi tidak mempelajari bagaimana perkembangan Amerika dari semulanya, dari semulanya perlindungan hak-hak rakyat itu selalu ada. Proteksi diadakan untuk melindungi upah buruh, kehidupan buruh, jadi mereka tidak mengerti. Saya bermaksud untuk menambahkan pasal 33, tentang

perkoperasian dan perlunya usahawan-
usahawan kita mendapat pendidikan.
Batik Keris menghancurkan perkoperasi-
an di Jawa Tengah.

- Drs. Soerowo : Yang penting perlu adanya perbedaan
batas tugas sektor negara dan sektor
swasta, kalau tidak akan terjadi seperti
sekarang, sehingga natural resources kita
akan hancur, demi generasi yang akan
datang. Pembatasan dari pada penguasa-
an negara terhadap sektor ekonomi itu
bagaimana?
- Bung Hatta : Saya pernah kemukakan misalnya hutan
di Kalimantan yang dikerjakan oleh
orang-orang Philipina sendiri, sekarang
tidak bekerja lagi, yang kerja cuma ba-
gian Timur.
Itu konsesi seharusnya dibatasi!
Transmigrasi dari Jawa bisa dimanfaat-
kan dididik dalam perkayuan, rotan,
tukang dengan koperasi.
Jangan korsi-korsi dibeli dari Singga-
pore, korsi rotan pun dari sana!
- Drs. Pratignyo : Pengertian swasta itu juga termasuk per-
koperasian yang akan bergerak juga da-
lam produksi dan distribusi.
- Bung Hatta : Ya pasal 33 itu dibagi tiga; ayat satu
tentang perkoperasian, ayat dua sektor
negara dan ayat tiga pengertian negara
menguasai; tidak mesti mengerjakan se-
muanya tapi dapat diberikan swasta,

sehingga uang yang mengganggu dapat bekerja, buruh yang mengganggu dapat dikerjakan.

- Drs. Soerowo : Kalau dapat dirumuskan secara garis besarnya, nanti dapat pula dijadikan pedoman untuk kuliah-kuliah di universitas.
- Bung Hatta : Saya kira pidato saya di DPA dapat digunakan pula untuk itu. Karangan no. 11 halaman 331, Kumpulan Karangan mengenai Koperasi. Pidato di depan DPA tahun 70.
- Drs. Pratigny : Banyak sekarang yang menganggap koperasi itu sudah lapuk, dan sukar dilaksanakan, kekeluargaan itu tradisional tidak bisa untuk mengorganisir perusahaan modern. Kalau fasal 33 sebagai sistem ekonomi tidak dilaksanakan; sistem ekonomi kekeluargaan menjadi pengertian tradisional, kuno.
- Bung Hatta : Saya pernah dikritik rapat ISEI di Jawa Timur, saya suruh meninjau ke Swedia, di sana perusahaan besar-besar dikuasai oleh koperasi, koperasi rumah, industri. Misalnya bola lampu Phillips mahal, didirikan koperasi pabrik bola lampu, harganya sekitar 200 uang sana dijualnya 195. Phillips gulung tikar. Tidak benar koperasi tidak sanggup, ini karena tidak dididik orang-orangnya.

- Drs. Soerowo : Contoh lagi perusahaan baja di Kalimantan akan diserahkan ke swasta, perusahaan Amerika, apa ini sesuai (fasal 33 UUD).
- Bung Hatta : Tidak sesuai.
- Drs. Soerowo : Kami mengingini pendapat dari Bung Hatta mengenai sektor negara sesuai dengan fasal 33 itu bagaimana?
Apa pabrik semen itu harus dikuasai negara?
- Bung Hatta : Mesti.
- Drs. Soerowo : Tahun 1975 akan berproduksi semen Cibinong, dan banyak pabrik baru yang akan berdiri dalam rangka PMA, dari fihak asosiasi semen ketakutan jika nanti ketuanya orang asing. Masalah sebenarnya kan tidak terletak di situ tetapi Pemerintah harus mencegah agar pabrik-pabrik semen tidak begitu saja diserahkan kepada orang asing.
- Bung Hatta : Memang demikian. Semen Gresik misalnya pengalaman saya dahulu; dibangun oleh orang-orang Amerika, dijalankan oleh orang Amerika, 2 tahun kemudian diserahkan kepada orang-orang kita yang dididik untuk itu. Sekarang tetap berjalan!
Sesudah itu saya anjurkan didirikan pabrik semacam semen Gresik agar setiap tempat ada kesempatan itu dapat diba-

ngun. Ini penting karena pembangunan kebutuhan semen akan meningkat.

Tapi jalan pikiran negara kita ini bagaimana; sudah cukup, cukup bagaimana sekarang kekurangan semen, terpaksa beli dari Luar Negeri.

Pupuk juga tidak cukup dibangun di Palembang saja, akhirnya kita kekurangan dan bukan main harganya pupuk di luar negeri. Berapa ratus persen naiknya?

Drs. Soerowo

: Soal pupuk itu pernah saya peroleh keterangan dari Pertamina yang mengusulkan didirikan social development agency; antara lain Pertamina mengusulkan di samping perminyakan mengusulkan kepada Pemerintah pabrik pupuk, tapi ditolak Bappenas.

Sekarang Pak Harto memberikan izin khusus karena ternyata dari \$ 80 per ton naik menjadi \$ 400. Jadi terpaksa merupakan kebijaksanaan di luar Bappenas.

Bung Hatta

: Saya tidak mengerti pikiran Bappenas, mereka tidak pernah pikir politik, bagaimana bisa orang memimpin Bappenas. Mereka hanya pikir keadaan di Amerika, swasta-swasta saja, sedangkan kita kan hampir tidak ada. Saya usulkan supaya dididik dulu; Pemerintah dulu lalu sebagian diserahkan pada swasta. Menidik dulu, tapi didiklah swasta yang cakap, diambil akademisi-akademisi kalau perlu tenaga-tenaga teknis dengan

tambahan pengetahuan, kalau koperasi supaya meninjau ke Swedia bagaimana cara menyusun etalase yang baik, bikin toko koperasi menjual barang untuk disusun yang menarik dan sebagainya, itulah tugas-tugas pemimpin koperasi!

- Prof.Mr. Sunario : Saya ingin tanya sebagai warga negara karena melihat ada hal yang aneh, menurut artikel 33, seharusnya apa yang vital strategis dikuasai negara, tetapi nyatanya banyak yang vital strategis dikasih swasta asing. ini kan nabrak artikel 33 dan pasal 11; perjanjian-perjanjian yang diadakan tidak diminta persetujuan DPR, dilanggar begitu saja.
- Bung Hatta : Ya bukan itu saja, naiknya pajak kan juga harus via DPR. Menteri keuangan naikan pajak begitu saja.
- Drs. Soerowo : Saya pernah bertanya kepada Pak Muljomiseno sewaktu di angkatan 45 sebagai anggota DPR ketua seksi ekonomi, apakah Pak Muljomiseno bisa mengatakan bahwa ekonomi sekarang ini sudah nyeleweng dari UUD 45 bahkan sudah liberalistis. Dijawabnya ya, tapi I am there alone.
- Bung Hatta : Kalau tidak ada desakan dari Bappenas memang tidak bisa dan akan terus semacam ini, karena dari sana rancangan itu. Saya tempo hari bicara lama juga dengan presiden, saya bicarakan juga ten-

tang keadilan sosial fasal 27 ayat 2. Lebih dari satu setengah jam; tentang menaikkan upah dan sebagainya, tentang keadilan sosial yang berkembang, Presiden ada niat, tetapi Bappenas menahan dia rupanya.

- Drs. Soerowo : Kalau kita semua menggunakan sumber UUD 45 persoalan itu semua sebenarnya tidak perlu terjadi.
- Bung Hatta : Sekarang misalnya pajak bukan main naiknya, ada lagi pajak dibayar di muka, tapi menetapkan tidak melewati DPR.
- Drs. Soerowo : Pengusaha-pengusaha swasta nasional sekarang banyak pula yang terus terang; baiklah saya tidak bisa bayar pajak, beslag saja saya punya perusahaan kalau demikian maka perusahaan-perusahaan asing saja yang akan berjalan.
- Prof.Mr.Subardjo : Apakah tidak ada orang lain yang bisa mengganti Bappenas itu?
- Prof.Mr.Sunario : Dari Berkeley atau kita?
- Bung Hatta : Jadi saya tambahkan fasal 33.
- Prof.Mr.Sunario : Ada lagi yang saya ingin tambahkan, mengenai literatur ini saya banyak; tentang Pancasila, nanti saya tambah. Selain dari pada itu halaman 13, powers s nya supaya dihilangkan.

- Bung Hatta : Kita ketemu seminggu lagi, apa sudah selesai, belum saya kira? Kalau sudah selesai baru kita mengadakan pertemuan yang lebih luas, di sana di 45.
- Wangsawijaya : Ini halaman-halaman nanti diatur kembali.
- Drs. Soerowo : Ya nanti kan kita jilid.
- Satu dikirim kepada Presiden, lainnya kepada Jenderal Surono dan Jenderal Djatikusumo, dua minggu lagi; minggu depan kan cukup di antara kita.
- Drs. Pratigny : Perlu diundang pula Pengurus Panitia Badan Penggerak dan DHN Angkatan 45 dan apakah sudah dapat direlease bahwa minggu yang akan datang Panitia 5 sudah dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- Bung Hatta : Bisa!
Kita kumpul lagi minggu depan tanggal 18 Pebruari 1975 pukul 09.15.
- Bung Hatta : Kapan konsepnya selesai?
- Prof.Mr.Sunario : Ya secepatnya.
- Wangsawijaya : Kira-kira dua hari lagi.
- Prof.Mr.Sunario : Ya dua hari lagi tanggal 14 Pebruari 1975.
- Wangsawijaya : Tanggal 14 Pebruari pukul 09.15.

III. Keputusan dan Kesimpulan-kesimpulan :

1. Sidang menyetujui sistematika uraian Pancasila yang terdiri dari: Pendahuluan; Pembukaan UUD dan Lahirnya Pancasila; Sila-sila Pancasila satu-satunya.
2. Mengadakan sidang sekali lagi untuk membulatkan rancangan naskah besok tanggal 18 Pebruari 1975 pukul 09.15.
3. Mengadakan pertemuan yang lebih luas antara lain dengan DHN 45, Jenderal Surono, Jenderal GPH. Djatikusumo, setelah selesai perumusan uraian tersebut.
4. Merelease hasil-hasil sidang ke III yang ditugaskan kepada Sekretaris I.

Disahkan :

Tanggal 18 Pebruari 1975

Jakarta, 11 Pebruari 1975

Ketua
ttd.

(Dr. Moh. Hatta)

Anggauta-anggauta :
ttd.

(Prof.Mr.Subardjo)

ttd.

(Prof. Mr. Sunario)

ttd.

(Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo)

Sekretaris I
ttd.

(Drs. Imam Pratigny)

Sekretaris II
ttd.

(Drs. Soerowo Abdoelmanap)

2. *DOKUMEN LAHIRNYA PANCASILA 1 JUNI 1945.*

P R A K A T A

Buku "Uraian Pancasila", hasil karya "Panitia Lima", kita cetak ulang. Kali ini dalam rangka memperingati "Hari Lahirnya Pancasila", yang ke 35, 1 Juni 1980 dan juga untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa salah seorang Proklamator Bung Hatta yang wafat pada hari Jumat Wage, tanggal 14 Maret 1980.

Untuk melengkapi buku Uraian Pancasila ini, sesuai dengan wasiat Bung Hatta kepada Sdr. Guntur Sukarno Putra tentang siapa yang mengemukakan pertama kali Pancasila untuk dasar Negara Indonesia Merdeka (telah dirumuskan juga oleh Panitia Lima dalam Buku Uraian Pancasila), maka untuk penerbitan kali ini kami lengkapi dengan dokumen bersejarah : "Pidato Ir Sukarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945".

Dengan melengkapi dokumen itu dimaksudkan akan memudahkan para peminat untuk mendapatkan bahan yang dewasa ini langka, juga kami harapkan terutama kepada angkatan muda generasi penerus, bahwa dengan mendalami dokumen itu mereka akan dapat lebih memahami dan menghayati Cita-Cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 beserta batang tubuh pasal-pasal nya.

Dengan wafatnya Bung Hatta, terdapat sementara penulis dan tokoh-tokoh politik yang membuat ulasan tentang retaknya Dwitunggal Sukarno - Hatta, tetapi mereka lupa mengemukakan sebab pokok terjadinya keretakan itu.

Pada hemat kami keretakan itu terutama akibat struktur ketatanegaraan, berdasarkan susunan pemerintahan kabinet parlementer UUDS tahun 1950, di mana kedudukan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, sehingga jabatan wakil presiden itu dirasakan tidak diperlukan. Namun secara halus Bung Hatta menanggukahkan niatnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden sampai dengan dilantik nya anggota-anggota Konsti-

tuante Bandung 1956.

Adapun pendapat Bung Hatta mengenai masalah itu kita ketemukan dalam buku "Demokrasi Kita" halaman 10 penerbitan Pustaka Antara tahun 1960 sebagai berikut :

"Di masa Republik Indonesia yang pertama itu telah dicoba mengubah sistim pemerintahan presidential menjadi sistim kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, yang bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Alasan yang dikemukakan ialah supaya presiden dan wakil presiden diperlindung oleh kabinet yang bertanggung jawab politik, yang setiap waktu dapat diganti bila diperlukan. Tetapi dalam praktek ternyata, bahwa bukan kabinet yang memperlindung presiden dan wakil presiden, memagari mereka dengan tanggung jawabnya melainkan sebaliknya....

Dalam UUD tahun 1950 ditetapkan sistim kabinet parlementer. Dwitunggal Sukarno - Hatta dijadikan simbol belaka dalam kedudukan presiden dan wakil presiden yang konstitusional, yang tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk sendiri-sendiri.

Dan mulai saat itu tamatlah pula pada hakekatnya sejarah Dwitunggal Sukarno - Hatta dalam politik Indonesia."

Bahwa dalam taktik/politik praktis sering di antara Sukarno - Hatta terdapat ketidakserasian adalah wajar, tetapi secara Ideologis Sukarno - Hatta tidak pernah retak, bahkan berdasarkan kenyataan sejarah kedua tokoh Proklamator itu saling mengisi. Pasal 33, 34, 27 aj 2 UUD 45 misalnya berasal dari Bung Hatta yang merupakan pelaksanaan ajaran Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pasal 33 UUD 45 pernah kami tanyakan kepada Bung Hatta sebagai berikut :

Tanya : "Bung Hatta adalah konseptor/ yang menciptakan pasal 33 UUD 1945; selain bentuk koperasi bagaimana cara kita mewujudkan pasal 33 UUD itu?"

Jawab : "Dengan melaksanakan ekonomi terpimpin".

Tanya : "Kalau demikian antara Bung Hatta dan Bung Karno

tidak ada perbedaan ideologis?"

Jawab : "Ya, hanya Karno sering maunyahantam saja!"

Dialoog ini terjadi di waktu kami bersama-sama Bapak Prof. Mr. Sunario dan Ibu Dra. S.K. Trimurti menghadap Bung Hatta untuk memohon beliau duduk menjadi penasehat "Lembaga Pembina Jiwa 45" Angkatan 45, di sekitar bulan Juni 1974, di kediaman beliau Jl. Diponegoro 57, Jakarta.

Dalam kesempatan ini kiranya tidak berlebihan bila kita kemukakan dialoog tersebut dan adalah merupakan pilihan yang setepat-tepatnya untuk mencetak ulang "Uraian Pancasila" ini untuk menghargai dan mengenang jasa-jasa Bung Hatta, tidak saja selaku ketua Panitia Lima, juga sebagai Bapak Koperasi dan Bapak pasal 33 UUD 1945; di mana rumusan pasal 33 itu sekaligus adalah merupakan ajaran Pancasila dalam kehidupan perekonomian.

Semoga arwah Bung Hatta diterima Tuhan Yang Esa di sisi-Nya sesuai dengan jasa-jasa dan amal beliau untuk negara dan bangsa, serta kita semua bangsa Indonesia yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan kesentosaan lahir batin untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan Bung Hatta dan para Pahlawan Kemerdekaan lainnya.

Drs. Imami Pratignyo
Sek. I. Panitia Lima.

WASIAT BUNG HATTA KEPADA GUNTUR:



*Dr. H. Mohammad Hatta, Proklamator dan Wakil Presiden
Republik Indonesia Pertama.*

PANCASILA

Dekat pada akhir bulan Mei 1945 dr. Radjiman, ketua Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang Panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat: "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, *apa dasarnya?* Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu, karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang. Mereka langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar. Salah seorang dari pada anggota Panitia Penyelidik Usaha-usaha kemerdekaan Indonesia itu, yang menjawab pertanyaan itu ialah Bung Karno, yang mengucapkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang berjudul Pancasila, lima sila, yang lamanya kira-kira satu jam. Pidato itu menarik perhatian anggota Panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh. Sesudah itu sidang mengangkat suatu Panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno itu. Di antara Panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang yang akan melaksanakan tugas itu, yaitu :

Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
Mr. A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosoejoso
Abdulkahar Muzakir

H.A. Salim
Mr. Ahmad Soebardjo
Wahid Hasjim
Mr. Muhammad Yamin

Orang sembilan ini mengubah susunan 5 sila itu dan meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa di atas. Sila kedua, yang

dalam rumusan Soekarno disebut Internasionalisme atau perikemanusiaan diganti dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga disebut Persatuan Indonesia pengganti sila kebangsaan Indonesia, yang dalam rumusan Bung Karno dia ditaroh di atas jadi sila pertama. Sila ke empat disebut Kerakyatan, yang dalam rumus Bung Karno sebagai sila ketiga disebut Mufakat atau Demokrasi. Sila kelima disebut Sila Kesejahteraan Sosial, yang dalam rumus Bung Karno disebut Sila ke-4 Keadilan Sosial. Seperti dikatakan tadi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam rumus Bung Karno menjadi Sila kelima dijadikan Sila pertama.

Pada tanggal 22 Juni 1945 pembaruan rumusan Panitia 9 itu diserahkan kepada Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia dan diberi nama "Piagam Jakarta". Kemudian seluruh Piagam Jakarta itu dijadikan "Pembukaan" Undang-Undang Dasar 1945, sehingga "Pancasila dan Undang-Undang Dasar" menjadi "Dokumen Negara Pokok".

Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah menjadi Satu Dokumen Negara itu diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan. Yang dicoret ialah 7 perkataan di belakang Ketuhanan, yaitu *"dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya"*. Sungguhpun 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja, pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur berkeberatan, kalau 7 kata itu di biarkan saja, sebab tertulis dalam pokok dari pada pokok dasar Negara kita, sehingga menimbulkan *kesan*, seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Komite Nasional dalam rapatnya yang pertama sudah mensahkan Undang-Undang Dasar yang diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan sekarang sudah menjadi UUD Negara kita lagi.

Jakarta, 16 Juni 1978.

ttd.

(Mohammad Hatta)

LAHIRNYA PANCASILA:

Pidato pertama tentang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, Presiden pertama Negara Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan perasaan gembira saya terima permintaan penerbit buku ini untuk memberikan sepatah dua patah kata pengantar, serta dengan segala senang hati saya penuhi permintaan tersebut.

Sebagai "Kaitjoo" (ketua) dari "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai" (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) saya mengikuti dan mendengar sendiri diucapkannya pidato ini oleh Bung Karno, sekarang Presiden Negara kita.

Oleh karena itu sungguh menggembirakan sekali maksud penerbit, untuk mencetak pidato Bung Karno ini, yang berisi "Lahirnya Pancasila", dalam sebuah buku kecil.

Badan "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai" itu telah mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan yang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.

"Lahirnya Pancasila" ini adalah buah "stenografisch verslag" dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan "Dasar (Beginsel) Negara kita", sebagai penjelmaan dari pada angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang penting ialah ISINYA!

Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh "Lahirnya Pancasila" ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi Dasar Negara kita, yang menjadi Rechtsideologie Negara kita; suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan

yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sedang ada di bawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang!

Selama Fascisme Jepang berkuasa di negeri kita, Demokratish Idee tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya.

Mudah-mudahan "Lahirnya Pancasila" ini dapat dijadikan pegangan, dijadikan pedoman oleh Nusa dan Bangsa kita seluruhnya, dalam usaha memperjoangkan dan menyempurnakan Kemerdekaan Negara.

Walikukun, tertanggal 1 Juli 1947.

Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat.

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma'af, beribu ma'af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja, yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosophische grondslag" dari pada Indonesia Merdeka. Philosophische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran-yang-sedalam-dalamnya, jiwa, hasyrat-yang-sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan "merdeka".

Merdeka buat saya ialah: "political independence", politieke onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata: : Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang -- saya katakan di dalam bahasa asing, ma'afkan perkataan ini -- "zwaarwichtig" akan perkara yang kecil-kecil. "Zwaarwichtig" sampai -- kata orang Jawa -- "jelimet". Jika sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggeris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, sampai jelimet! Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Di situ ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu! Toch Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula - jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat - Sovyet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovyet, adakah rakyat Sovyet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyon rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80 % tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fülöp Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Sovyet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovyet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia Merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Ma'af, P.T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancang sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu,

sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, — sampai di lobang kubur! (*Tepuk tangan riuh*).

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun '33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama "Mencapai Indonesia Merdeka". Maka di dalam risalah tahun '33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, — in one night only! —, kata Armstrong di dalam kitabnya Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! Sesudah "jembatan" itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian dari pada itu Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, — semuanya di seberang jembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovyet Rusia Merdeka, telah mempunyai Jnepprprostoff, dam yang maha besar di sungai Jneppr? Apa ia telah mempunyai radio-station, yang menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovyet Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Jneppr-

prostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat, — jikalau tuan-tuan demikian —, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyon banyaknya. Dua milyon pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyon pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang! (*Tepuk tangan riuh*).

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia Merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan "INDONESIA MERDEKA SEKARANG". Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang! (*Tepuk tangan riuh*).

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia Merdeka, — kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati! Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Condro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo-Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, — in one night, di dalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milyon, semuanya bersemboyan : Indonesia Merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara

kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata : mangké rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka? (*Seruan : Tidak! Tidak!*).

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini Balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menit pun kita tidak akan menolak, sekarang pun kita menerima urusan itu, sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka!

(*Tepuk tangan menggemparkan*).

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbedaan antara Sovyet Rusia, Saudi Arabia, Inggeris, Amerika dan lain-lain tentang isinya : tetapi ada satu yang sama, yaitu, rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggeris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk Merdeka. (*Tepuk tangan riuh*).

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata : Ah, saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji f. 500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai meja-kursi yang

selengkap-lengkapnnya, sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata : Saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu "meja makan", lantas satu zice, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaén! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan satu tikar, dengan satu periuk : dia kawin. Marhaén dengan satu tikar, satu gubug : kawin. Sang klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zice, satu tempat tidur : kawin.

Sang Ndoro yang mempunyai rumah gedung, electriche kookplaat, tempat-tidur, uang bertimbun-timbun : kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig, belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Ndoro dengan tempat-tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (*Tepuk tangan, dan tertawa*). Tekad hatinya yang perlu, tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndoro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai gerozilver satu kaset plus kinder-uitzet, — buat 3 tahun lamanya! (*Tertawa*).

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: — kita ini berani merdeka atau tidak?? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan : kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka!

(*Tepuk tangan riuh*).

Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan

rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Sovyet Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovyet Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata : kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak dysenterie, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu. "Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka".

Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam keté-péng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan "jembatan". Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui, satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationaalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama : merdeka. Tidak perduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak perduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak perduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu

negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahnya, — sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, *zwaarwichtig*, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya : Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak! (*Jawab hadirin : Mau!*).

Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal "merdeka", maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar.

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan minta dasar, minta *philosophische grondslag*, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "*Weltanschauung*", di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu "*Weltanschauung*". Hitler mendirikan Jermania di atas "*national-sozialistische Weltanschauung*", — filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas satu "*Weltanschauung*", yaitu *Marxistische, Historisch-Materialistische Weltanschauung*, Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas satu "*Weltanschauung*", yaitu yang dinamakan "*Tennoo Koodoo Seishin*". Di atas "*Tennoo Koodoo Seishin*" inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu "*Weltanschauung*", bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia : Apakah "*Weltanschauung*" kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, "*Weltanschauung*", ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealisme di seluruh dunia

bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam "Weltanschauung", bekerja mati-matian untuk me-"realiteitkan" "Weltanschauung" mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikoeso, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan. Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed : "Sovyet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin c.s.", — John Reed, di dalam kitabnya : "Ten days that shook the world", "sepuluh hari yang menggoncangkan dunia" —, walaupun Lenin mendirikan Sovyet Rusia di dalam 10 hari, tetapi "Weltanschauung"-nya telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dulu telah tersedia "Weltanschauung"-nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu di atas "Weltanschauung" yang sudah ada. Dari 1895 "Weltanschauung" itu telah disusun. Bahkan dalam revolutie 1905, "Weltanschauung" itu "dicobakan", di "generale-repetitie-kan".

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri "generale-repetitie" dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, "Weltanschauung" itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas "Weltanschauung" yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya "Weltanschauung" itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini, "Weltanschauung" ini, dapat menjelma dengan dia punya "Münchener Putsch", tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat

merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar "Weltanschauung" yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan Ketua, timbullah pertanyaan: Apakah "Weltanschauung" kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan oleh doktor Sun Yat Sen?

Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi "Weltanschauung"-nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancang. Di dalam buku "The three people's principles", San Min Chu I, Mintsu, Minchuan, Min Sheng, — nasionalisme, demokrasi, sosialisme, — telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas "Weltanschauung" San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka di atas "Weltanschauung" apa? Nasional-sosialisme-kah? Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau "Weltanschauung" apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, -- macam-macam --, tetapi alangkah benarnya perkataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu "Weltanschauung" yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu! Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya : Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang,

untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara, yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, — tetapi "semua buat semua". Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah : Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan.

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain : maafkanlah saya memakai perkataan "kebangsaan" ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempoh sedikit : Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syarat bangsa ialah "kehendak akan bersatu". Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menyebut syarat bangsa : "le désir d'être ensemble", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya "Die Nationalitätenfrage", di situ ditanyakan : "Was ist eine Nation?" dan jawabnya ialah : "Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarin pun, tat kala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata : "verouderd", "sudah tua". Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah "verouderd", sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tat kala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tat kala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tat kala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft" nya dan perasaan orangnya,

"l'âme et le désir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t. membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana "kesatuan-kesatuan" di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai "golfbreker" atau pengadang gelombang lautan Pacific adalah satu kesatuan.

Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah s.w.t. demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah-air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah-air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak

cukup "le désir d'être ensemble", tidak cukup definisi Otto Bauer "aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft" itu. Ma'af saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada "désir d'être ensemble", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2½ milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa "le désir d'être ensemble", tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le désir d'être ensemble", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "le désir d'être ensemble" di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada "le désir d'être ensemble", sudah terjadi "Charaktergemeinschaft!" Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!
(Tepuk tangan hebat).

Ke sinilah kita semua harus menuju : mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jer-

manialah satu nationale staat, bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punyab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga India-lah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikianlah pula bukan semua negeri-negeri di tanah-air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrooesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus didirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama : Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Ma'af, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaityoo, Tuan menjawab : "Saya tidak mau akan kebangsaan".

Tuan Lim Koen Hian : Bukan begitu. Ada sambungannya lagi.

Tuan Soekarno: Kalau begitu, ma'af, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya "menschheid", "peri-kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa : Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, — katanya : jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, — ialah Dr. Sun Yat Sen! Di dalam tulisannya "San Min Chu I" atau "The Three People's Principles", saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh "The Three People's Principles" itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai pengajurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima-kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, — sampai masuk ke lobang kubur.

(Anggauta-anggauta Tionghoa bertepuk tangan).

Saudara-saudara. Tetapi . . . tetapi . . . memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham "Indonesia über Alles". Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu mempunyai bahasa yang

satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata : "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri-kemanusiaan". "My nationalism is humanity".

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan "Deutschland über Alles", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru "bangsa Aria", yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan "internasionalisme". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua" semua buat satu". Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuat-

nya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — ma'af beribu-ribu ma'af, keislaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita

berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Ma'af seribu ma'af, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, — fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi-Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan!

Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip : tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka, Saya katakan tadi : prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng; nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus : Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum

kapitalnya merajalela, atautkah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum Kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum Kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar menurut resepnya Fransche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie di sana itu hanyalah politieke democratie saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, — tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaurès, yang menggambarkan politieke democratie. "Di dalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaurès, di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak politiek yang sama, tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?" Maka oleh karena itu Jean Jaurès berkata lagi :

"Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politiek itu, di dalam Parlement dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam paberik, — sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar ke luar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa".

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan : Kalau kita mencari demo-

krasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip : politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie "vooronderstelt erfelijkheid",

turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Bagoes Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, — atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, — atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.

Prinsip yang kelima hendaknya :

Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhan-nya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. (*Tepuk tangan sebagian hadirin*). Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan : bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan ber-Tuhan.

Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, di situlah tempatnya kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam, yaitu dengan cara yang berkebudayaan!

Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Inderia. Apa lagi yang lima bilangannya? (*Seorang yang hadir : Pendawa lima*). Pendawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip : kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi — saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa — namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (*Tepuk tangan riuh*).

Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah "perasan" yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme.

Dan Demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi politiek-economische democratie, yaitu politieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie.

Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga : socio-nationalisme, socio-democratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan : kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, buat Indonesia, — semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "Gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong! (*Tepung tangan riuh-rendah*).

"Gotong-Royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Sukarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemeras-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! (*Tepuk tangan riuh-rendah*).

Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara.

Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, tetapi

terserah kepada Tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih : trisila, ekasila ataukah pancasila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan, saudara-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia, — di dalam guntunya peperangan! Bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia yang gemblengan, Indonesia Merdeka yang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah s.w.t.

Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan yang bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis, Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhanan. Pancasila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah kepada saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, men-

jadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!

Janganpun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia, janganpun yang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen!

"De Mensch", — manusia! —, harus perjoangkan itu. Zonder perjoangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit! Leninisme tidak bisa menjadi realiteit zonder perjoangan seluruh rakyat Rusia, San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjoangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu : zonder perjoangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit. Janganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Qur'an, zwart op wit (tertulis di atas kertas), tidak dapat menjelma menjadi realiteit zonder perjoangan manusia yang dinamakan ummat Islam, Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjoangan ummat Kristen.

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, — janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjoangan, perjoangan, dan sekali lagi perjoangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjoangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata : Di dalam Indonesia Merdeka itu perjoangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjoangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu-padu, berjoang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaallah, tanamkanlah dalam

kalbu saudara-saudara, bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil risiko, — tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai ke akhir jaman! Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, — merdeka atau mati!"

(Tepuk tangan riuh).

Saudara-saudara! Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta ma'af bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar, dan sudah meminta tempo yang sedikit lama, dan saya juga minta ma'af, karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyokutvoo yang saya anggap "verschrikkelijk zwaarwichtig" itu.

Terima kasih!

(Tepuk tangan riuh rendah dari segenap hadirin).





BUKU – BUKU UMUM

Dr. Moh. Hatta, dkk :

PENJABARAN PASAL 33 UUD 45 (buku 1)

Ukuran 14½ x 22 cm, 72 halaman

Dra. S.K. Trimurti, dkk :

PENJABARAN PASAL 33 UUD 45 (buku 2)

Ukuran 13 x 19½ cm, 82 halaman

Penerbit Mutiara :

ALBUM PAHLAWAN NASIONAL

Ukuran 29 x 23½ cm, 96 halaman

Penerbit Mutiara :

GAMBAR-GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL

Ukuran 14½ x 63 cm, Cetak fulcolour

Dr. A.H. Nasution :

**SEKITAR PERANG KEMERDEKAAN
INDONESIA**

Ukuran 16 x 24 cm, edisi Biasa & Lux.

Jilid I. Proklamasi

Jilid II. Diplomasi atau Bertempur

Jilid III. Diplomasi sambil Bertempur

Jilid IV. Periode Linggarjati

Jilid V. Agresi Militer Belanda I

Jilid VI. Perang Gerilya Semester I

Jilid VII. Periode Renville

Jilid VIII. Pemberontakan PKI

Jilid IX. Agresi Militer Belanda II

Jilid X. Perang Gerilya Semester II

Jilid XI. Periode KMB



MUTIARA OFFSET JAKARTA